



# LAPORAN KINERJA

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

## TKPK KOTA BANDA ACEH

# 2017



**Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)**  
**Kota Banda Aceh**

## **Kata Pengantar**

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Banda Aceh Tahun 2017 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja TKPK Kota Banda Aceh dibuat sesuai dengan aturan dalam Bab Hubungan Kerja dan Tata Kerja, Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010. Laporan Kinerja TKPK merupakan laporan yang disusun pada semester 1 dalam rangka pelaksanaan koordinasi antara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana peran dan fungsi TKPK dalam mengatasi tingkat kemiskinan, perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Banda Aceh yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama TKPK.

Demikian laporan Kinerja TKPK Kota Banda Aceh Tahun 2017 ini disusun dengan harapan dapat menjadi bahan acuan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholders Kota Banda Aceh dalam menjalankan kapasitasnya sebagai lembaga yang fokus pada penanggulangan kemiskinan.

Banda Aceh,        Juli 2017

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Banda Aceh

**Ir. GUSMERI, MT**

Pembina Utama Muda/19590810 198903 1003

## DAFTAR ISI

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR.....                                                                             | 1   |
| DAFTAR ISI.....                                                                                 | I   |
| DAFTAR TABEL .....                                                                              | II  |
| DAFTAR GRAFIK.....                                                                              | III |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                         | 1   |
| 1.1.    LATAR BELAKANG.....                                                                     | 1   |
| 1.2.    LANDASAN HUKUM.....                                                                     | 4   |
| 1.3.    SISTEMATIKA PENYUSUNAN .....                                                            | 5   |
| BAB II KONDISI KEMISKINAN KOTA BANDA ACEH.....                                                  | 7   |
| 2.1.    KONDISI KEMISKINAN DAN KETENAGAKERJAAN.....                                             | 8   |
| 2.1.1 Kemiskinan.....                                                                           | 8   |
| 2.1.2 Ketenagakerjaan.....                                                                      | 10  |
| 2.2.    BIDANG KESEHATAN .....                                                                  | 14  |
| 2.3.    BIDANG PENDIDIKAN.....                                                                  | 20  |
| 2.4.    BIDANG PRASARANA DASAR .....                                                            | 27  |
| 2.4.1. Akses Air Minum Layak .....                                                              | 27  |
| 2.4.2. Akses Sanitasi Layak .....                                                               | 28  |
| 2.4.2. Akses Listrik.....                                                                       | 29  |
| 2.5.    BIDANG KETAHANAN PANGAN .....                                                           | 31  |
| 2.6.    SURVEY DAN ANALISA DATA KEMISKINAN TAHUN 2017 .....                                     | 33  |
| BAB III RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN<br>KEMISKINAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 ..... | 38  |
| BAB IV KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN<br>PENANGGULANGAN KEMISKINAN .....               | 49  |
| BAB V PENUTUP.....                                                                              | 50  |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABEL 2. 1 KRITERIA FAKIR DAN MISKIN KOTA BANDA ACEH.....                                                                                       | 8  |
| TABEL 2. 2 FASILITAS KOTA BANDA ACEH.....                                                                                                       | 21 |
| TABEL 2. 3 CAPAIAN INDIKATOR KETAHANAN PANGAN KOTA BANDA ACEH .....                                                                             | 32 |
| TABEL 2. 4 DATA AGREGAT BDT RTS DENGAN KONDISI TINGKAT KESEJAHTERAAN<br>DARI 10%-40% TERENDAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015 PER KECAMATAN          | 34 |
| TABEL 2. 5 PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DENGAN KONDISI TINGKAT<br>KESEJAHTERAAN DARI 10%-40% TERENDAH DI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015<br>..... | 36 |
| TABEL 3. 1 RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA<br>BANDA ACEH TAHUN 2017 .....                                              | 41 |
| TABEL 3. 2 SUMBER DANA PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ...                                                                           | 48 |

## DAFTAR GRAFIK

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| GRAFIK 2. 1 POSISI RELATIF TINGKAT KEMISKINAN (%) KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 .....                                                   | 9  |
| GRAFIK 2. 2 PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN KOTA BANDA ACEH .....                                                                    | 10 |
| GRAFIK 2. 3 RELEVANSI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%) KOTA BANDA ACEH TERHADAP PROVINSI ACEH DAN NASIONAL TAHUN 2012 – 2015 .....   | 11 |
| GRAFIK 2. 4 PERBANDINGAN TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN OLEH PENGANGGURAN DI KOTA BANDA ACEH DAN NASIONAL TAHUN 2012 - 2015 .... | 12 |
| GRAFIK 2. 5 RELEVANSI TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH DAN NASIONAL TAHUN 2012 – 2015 .....  | 14 |
| GRAFIK 2. 6 ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) DI KOTA BANDA ACEH .....                                                                       | 15 |
| GRAFIK 2. 7 JUMLAH KEMATIAN BAYI MENURUT UPTD PUSKESMAS DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 .....                               | 16 |
| GRAFIK 2. 8 JUMLAH KEMATIAN BALITA MENURUT UPTD PUSKESMAS DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016.....                              | 17 |
| GRAFIK 2. 9 ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DI KOTA BANDA ACEH .....                                                                        | 18 |
| GRAFIK 2. 10 CAKUPAN K1 DAN K4 IBU HAMIL DI KOTA BANDA ACEH .....                                                                    | 19 |
| GRAFIK 2. 11 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DAN KUNJUNGAN NIFAS DI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012 – 2016 .....     | 20 |
| GRAFIK 2. 12 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KOTA BANDA ACEH 2013-2016* .....                                                       | 21 |
| GRAFIK 2. 13 POSISI RELATIF ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMA/MA (%) KABUPATEN DI PROVINSI ACEH 2016.....                            | 23 |
| GRAFIK 2. 14 POSISI RELATIF ANGKA BUTA HURUF PENDUDUK USIA 15+ (%) KABUPATEN DI PROVINSI ACEH 2016.....                              | 24 |
| GRAFIK 2. 15 POSISI RELATIF JARAK SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA/MA (km) KABUPATEN.....                                                   | 25 |
| GRAFIK 2. 16 CAPAIAN INDIKATOR MELALUI KEGIATAN PENDIDIKAN DINIYAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2013-2016 .....                             | 26 |

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| GRAFIK 2. 17 RUMAH TANGGA BERDASARKAN SUMBER AIR MINUM DI KOTA BANDA<br>ACEH (PERSEN), 2010-2015 .....                                                          | 28 |
| GRAFIK 2. 18 RUMAH TANGGA BERDASARKAN FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR<br>DI KOTA BANDA ACEH (PERSEN), 2011-2016.....                                           | 29 |
| GRAFIK 2. 19 PERKEMBANGAN PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN AKSES LISTRIK .                                                                                          | 30 |
| GRAFIK 2. 20 POSISI RELATIF PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN AKSES LISTRIK<br>(PERSEN) PROVINSI ACEH TAHUN 2016.....                                                | 31 |
| GRAFIK 2. 21 JUMLAH RUMAH TANGGA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN DENGAN<br>KONDISI TINGKAT KESEJAHTERAAN DARI 10%-40% TERENDAH DI KOTA BANDA<br>ACEH TAHUN 2015..... | 35 |
| GRAFIK 3. 1 PERSENTASE SUMBER DANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN .....                                                                                              | 48 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam satu dekade di era reformasi ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, baik dari perbaikan kebijakan, penciptaan program penanggulangan kemiskinan, maupun melakukan sinergi dengan multipihak dalam mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Kemiskinan bukan hanya menjadi masalah perseorangan, tapi merupakan permasalahan semua pihak. Karena kemiskinan berdampak sistemik, menyangkut segala sisi kehidupan, sehingga jika tidak segera diatasi, maka permasalahan kemiskinan tersebut akan merambah ke permasalahan lain seperti meningkatnya angka pengangguran dan tingkat kriminalitas, menurunnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan serta dampak sosial lainnya. Lebih lanjut, kompleksitas dari kemiskinan bukan saja berhubungan dengan pengertian dan dimensinya saja, tetapi juga berkaitan dengan metode pengukuran dan intervensi kebijakan yang diperlukan dalam mengentaskan masalah ini. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu segera diatasi dengan menyusun langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.

Masalah kemiskinan telah menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Banda Aceh seperti yang tercantum dalam RPJMD 2017 – 2022, terutama misi ke-3 yaitu ***Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat*** dengan tujuan dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perbaikan pendapatan masyarakat yang dalam lima tahun ke depan yang berdampak kepada peningkatan PAD dengan kebijakan dan strategi yang efektif sehingga pada



gilirannya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

Berikut ini adalah Visi dan Misi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022

#### *Visi*

### **“Terwujudnya Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah”**

#### *Misi*

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berikut ini adalah target untuk menekan angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJM Propinsi Aceh dan RPJM Kota Banda Aceh

#### Target RPJM Nasional pada Tahun 2017

- Angka Kemiskinan : 9,5-10,5 %
- Angka Pengangguran : 5,1–5,4 %

#### Target RPJM Provinsi Aceh pada Tahun 2017

- Angka Kemiskinan : 15.89 %

#### Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 2017

- Angka Kemiskinan : 7,38 %



Pemerintah Republik Indonesia dalam menyusun RAPBN 2017 menargetkan angka kemiskinan dan angka pengangguran yang lebih rendah meskipun memiliki beberapa program kesejahteraan rakyat. Tahun 2017 ini secara nasional target kemiskinan pada kisaran 9,5-10,5 persen yang lebih rendah dibandingkan pada APBN-P 2016 yakni sebesar 9-10 persen. Sementara target angka pengangguran terbuka pada tahun 2017 ditargetkan sekitar 5,1 – 5,4 persen. Hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan target APBN 2016 yaitu 5,2 – 5,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan APBN 2017 lebih realistis dan kredibel agar lebih terpercaya oleh pasar. Perhitungan target ini mengacu pada perkiraan realisasi kemiskinan tahun 2016 yang di kisaran 10 – 10,6 persen. Sementara angka pengangguran terbuka tahun 2016 diperkirakan berada pada kisaran 5,4 – 5,7 persen.

Untuk Provinsi Aceh angka kemiskinan pada tahun 2016 berada di angka 16,8 persen, pada tahun 2017 ditargetkan menjadi 15,89 persen. Pemerintah Aceh pada pemerintahan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah menargetkan penurunan sebesar 1 persen setiap tahunnya. Jika target tersebut tercapai, maka kemiskinan di Aceh akhir periode Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah bisa mencapai 11,8 persen.

Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan proyeksi angka kemiskinan pada tahun 2017 turun menjadi 7,38 %, dibandingkan tahun 2013 sebesar 8,58 % sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017.

Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Banda Aceh Tahun 2017 disusun dalam rangka pelaksanaan koordinasi antara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua pihak sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh tahun 2017.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja TKPK adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi antara TNP2K dengan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Mempertegas komitmen semua pihak terutama Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparaturnya pemerintah Kota Banda Aceh untuk memahami arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu satu tahun.
4. Sebagai panduan umum dan operasional pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh, dan
5. Sebagai kerangka acuan demi mewujudkan komitmen keterpaduan program, peran serta pemerintah, swasta, masyarakat maupun berbagai pihak dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan berkelanjutan.

Manfaat Laporan Kinerja TKPK adalah:

1. Sebagai acuan resmi masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang berkonsentrasi pada penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan keberdayaan, keswadayaan dan kemandirian.
2. Sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam berpartisipasi menyumbangkan sumber daya yang dimiliki, sehingga tercipta pola pikir yang efektif dan harmonis.
3. Sebagai dasar kegiatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah dan digunakan sebagai arahan kegiatan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar waktu, antar satuan kerja perangkat daerah, antar kegiatan dan antar pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja TKPK Kota Banda Aceh Tahun 2017 ini didasarkan pada dasar hukum dan acuan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Aturan perundangan Keuangan Negara menjadi dasar bagi analisis penganggaran percepatan penanggulangan kemiskinan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
6. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan, tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah.
7. Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat.
8. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan sebagai arah implementasi program-program percepatan penanggulangan kemiskinan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian.
10. Peraturan Walikota Banda Aceh No.37 Tahun 2012 tentang RPJM Kota Banda Aceh 2012-2017.
11. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 261 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Banda Aceh.

### **1.3. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja TKPK Kota Banda Aceh Tahun 2017 ini adalah :

#### **Bab I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

## **Bab II KONDISI KEMISKINAN KOTA BANDA ACEH**

- 2.1. Kondisi Kemiskinan dan Ketenagakerjaan
- 2.2. Bidang Kesehatan
- 2.3. Bidang Pendidikan
- 2.4. Bidang Prasarana Dasar
- 2.5. Bidang Ketahanan Pangan
- 2.6. Survey dan Analisa Data Kemiskinan Tahun 2017

## **Bab III RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2017**

## **Bab IV KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

## **Bab V PENUTUP**

## **BAB II**

### **KONDISI KEMISKINAN KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh yang merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh adalah sebuah kota tua yang sudah mencapai 812 tahun. Kota Banda Aceh yang terletak antara 05° 16' 15" – 05° 36' 16" LU dan 95° 16' 15" – 95° 22' 35" BT, kota yang memiliki panjang garis pantai sepanjang 14 Km dengan luas 61.3 km<sup>2</sup>, keadaan iklim tropis dengan temperatur yang berfluktuasi antara 22°C hingga 32°C. Rata-rata ketinggian darat dari permukaan laut adalah 0,80 meter diatas permukaan laut.

Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan dengan 90 gampong dan 17 mukim, berpenduduk sebanyak 254.904 jiwa di tahun 2016. Letak Kota Banda Aceh yang berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah Utara, Samudera Indonesia di sebelah Barat dan Kabupaten Aceh Besar di bagian Timur dan Selatan sehingga menjadikan Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat pembelajaran Islam, pusat kebudayaan, pusat kesehatan, dan daerah tujuan wisata.

Berdasarkan data statistik kota Banda Aceh oleh Badan Pusat Statistik Banda Aceh terjadi penurunan persentase tingkat kemiskinan di kota Banda Aceh dari tahun 2013-2016 yaitu 8,03 persen pada tahun 2013 menjadi 7,41 persen di tahun 2016. Walaupun terjadi penurunan, Pemerintah Kota Banda Aceh tetap berupaya untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan ini. Salah satu upaya untuk penanggulangannya, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan kriteria kemiskinan yang merupakan penyesuaian antara indikator nasional dan lokal yang disusun di tahun 2008 berdasarkan Keputusan Walikota No. 243, sebagai berikut:

Tabel 2. 1  
Kriteria Fakir dan Miskin Kota Banda Aceh

| NO | KRITERIA LOKAL                                           | BOBOT     | KLASIFIKASI                       |                                   |
|----|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|    |                                                          |           | FAKIR                             | MISKIN                            |
| 1  | 2                                                        | 3         | 4                                 | 5                                 |
| 1  | Pendapatan Rumah Tangga per bulan                        | 6         | Pendapatan Kurang dari Rp 450.000 | PendapatanRp 450.000 – Rp 900.000 |
| 2  | Luas lantai tempat tinggal                               | 4         | 0 - 4 m <sup>2</sup> / orang      | 5 - 7 m <sup>2</sup> / orang      |
| 3  | Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga             | 4         | Tidak ada                         | Serabutan/tidak tetap             |
| 4  | Sumber air minum                                         | 4         | Sumur                             | Sumur                             |
| 5  | Frekuensi makan daging sapi/ayam dalam seminggu          | 4         | Tidak pernah                      | Satu kali                         |
| 6  | Kemampuan membeli pakaian baru selama 6 (enam) bulan     | 4         | Tidak pernah                      | Satu kali                         |
| 7  | Kemampuan berobat                                        | 4         | Puskesmas                         | RSU                               |
| 8  | Memiliki tabungan dalam bentuk uang atau barang          | 2         | Aset < Rp 500.000                 | Aset ≤ Rp 1.000.000               |
| 9  | Jenis lantai bangunan                                    | 2         | Semen kasar                       | Semen halus                       |
| 10 | Jenis dinding bangunan                                   | 2         | Kayu kualitas rendah              | Tembok kualitas rendah            |
| 11 | Sumber penerangan utama                                  | 2         | Petromak/pelita                   | PLN (4 A)                         |
| 12 | Kondisi kesehatan balita                                 | 2         | Kurang gizi                       | Kurang gizi                       |
| 13 | Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga | 2         | Tamat SD/MI                       | Tamat SMP/MTs                     |
| 14 | Kemampuan menyekolahkan anak (usia 7-15 tahun)           | 2         | Hanya sampai SD                   | Hanya sampai SLTA                 |
|    | <b>JUMLAH</b>                                            | <b>44</b> |                                   |                                   |

Miskin : Skor < ( 60 % dari total bobot )

Fakir : Skor 26 – 44

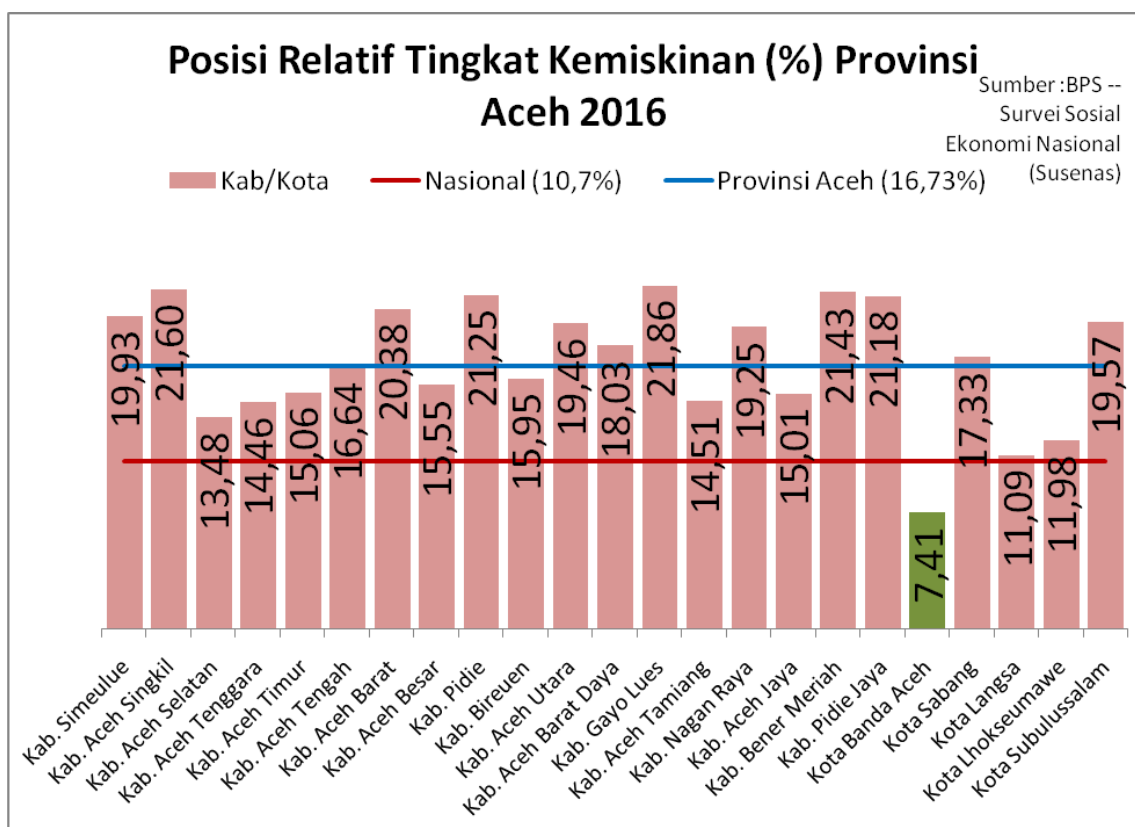
## 2.1. Kondisi Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

### 2.1.1 Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan demikian, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Untuk melihat posisi relatif tingkat kemiskinan Kota Banda Aceh untuk tahun 2016 dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Aceh dan Provinsi Aceh serta Nasional dapat dilihat pada grafik 2.1 di bawah ini

Grafik 2. 1  
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Kota Banda Aceh  
Tahun 2016



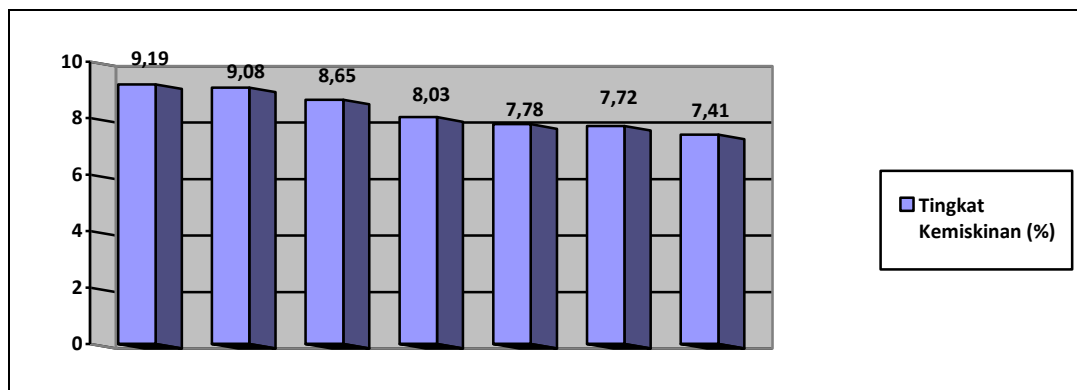
Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Dari grafik 2.1 di atas dapat dilihat posisi relatif tingkat kemiskinan Kota Banda Aceh (7,41 persen) paling rendah dibandingkan kabupaten/kota di Aceh, juga dibawah tingkat kemiskinan Nasional (10,7 persen) dan Provinsi Aceh (16,73 persen).



Untuk melihat perkembangan tingkat kemiskinan Kota Banda Aceh dari tahun 2010 - 2016 dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2. 2  
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Banda Aceh  
Tahun 2010 – 2016



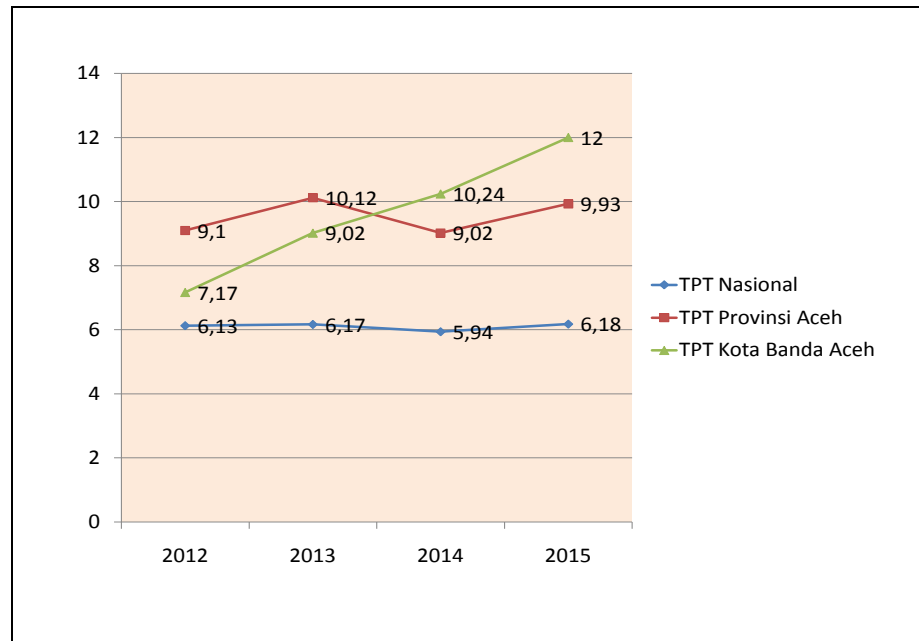
*Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*

Tingkat kemiskinan Kota Banda Aceh sejak tahun 2010 (9,19 persen) terus mengalami penurunan sampai tahun 2016 sebesar 7,41 persen, walaupun penurunannya sedikit setiap tahunnya tapi ini merupakan hal yang mengembirakan untuk Kota Banda Aceh.

### 2.1.2. Ketenagakerjaan

Masalah pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi berbagai negara di dunia, tingginya angka pengangguran akan berpengaruh pada melambatnya pertumbuhan perekonomian. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang harus dapat diatasi dengan baik. Pengangguran yang terlalu besar membawa efek terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, memperlambat proses pembangunan, meningkatnya angka kriminalitas dan lain sebagainya. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kota Banda Aceh, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. 3  
Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Banda Aceh Terhadap  
Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2012 – 2015



*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional 2013-2016*

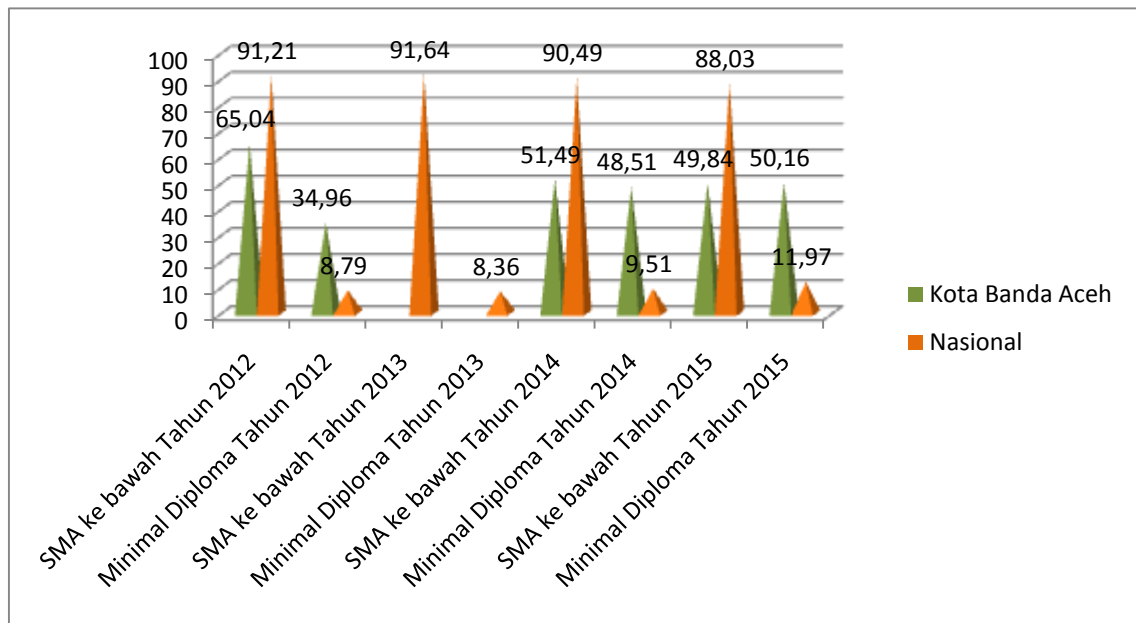
Dalam hal relevansi, dapat dilihat bahwa kecenderungan kenaikan TPT di Kota Banda Aceh relevan dengan kecenderungan kenaikan TPT di level Aceh maupun Nasional.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari 7,17 persen pada tahun 2012 menjadi 12,00 persen pada tahun 2015 dari jumlah angkatan kerja sebanyak 115.696 orang. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Aceh, kondisi pengangguran di Kota Banda Aceh pada tahun 2015 berada dibawah persentase pengangguran Provinsi Aceh yang rata-rata 9,93 persen dan tingkat pengangguran rata-rata Nasional sebesar 6,18 persen.

Jumlah penduduk yang masuk ke Kota Banda Aceh pada tahun 2011 (12.000 jiwa) hingga tahun 2015 (7.274 jiwa) yang justru menurun, maka faktor migrasi penduduk ke Kota Banda Aceh bukanlah penyebab utama tingginya tingkat pengangguran di Banda Aceh. Yang menjadi faktor pendukung tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Banda Aceh adalah kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian

dan kemampuan sebagian angkatan kerja serta melambatnya pertumbuhan ekonomi secara Nasional.

Grafik 2. 4  
Perbandingan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan oleh Pengangguran  
di Kota Banda Aceh dan Nasional tahun 2012 - 2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh dan Nasional 2013-2016

Keterangan : BPS Kota Banda Aceh tidak menyediakan Data tahun 2013 (np: not published)

Belum bisa ditemukan data tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pengangguran di Aceh di Website BPS Provinsi Aceh

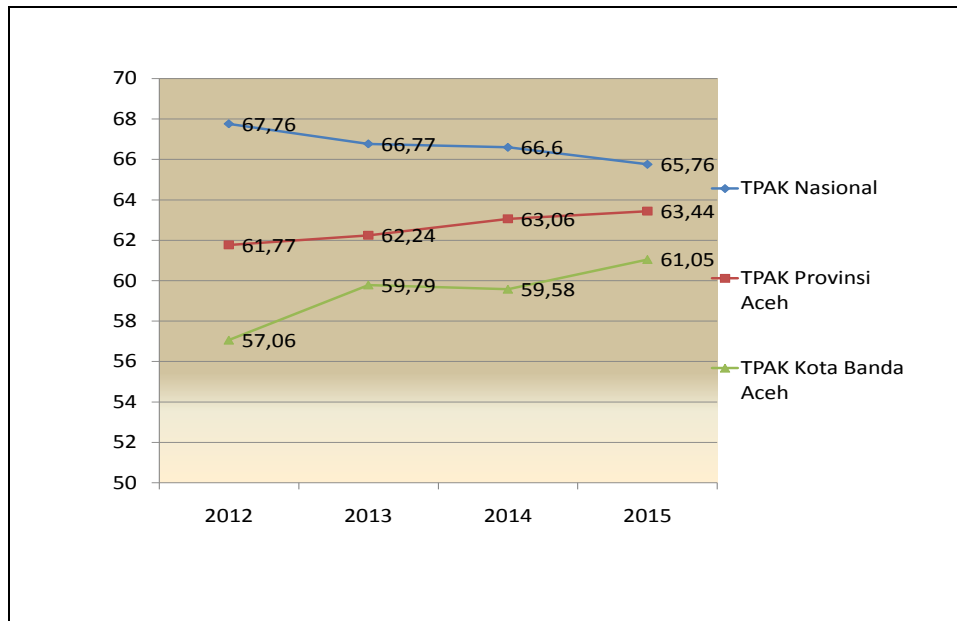
Dari grafik di atas dapat dilihat dari komposisi mereka yang menganggur dari tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Pada tahun 2012, lebih dari dua pertiga (65,04 persen) pengangguran di Kota Banda Aceh menamatkan pendidikan setingkat SMA/ sederajat atau dibawahnya. Hanya sepertiga di antara mereka yang menamatkan pendidikan minimal diploma. Pada tahun 2015, pengangguran yang menamatkan pendidikan minimal diploma justru sedikit lebih banyak dibandingkan mereka yang hanya menamatkan pendidikan setingkat SMA/ sederajat atau dibawahnya (50,16 persen dibandingkan 49,84 persen). Sementara jika dilihat secara Nasional pengangguran yang menamatkan pendidikan minimal diploma ke bawah pada

tahun 2012 sampai tahun 2015 sangat sedikit jika dibandingkan dengan pengangguran dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah.

Peningkatan jumlah angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh tidak dibarengi dengan perluasan lapangan kerja atau kapasitas produksi, akibatnya jumlah pengangguran mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran merupakan masalah yang sangat serius dan sangat mempengaruhi kondisi daerah, karena jumlah pengangguran merupakan indikator majunya perekonomian suatu daerah yang dapat menunjukkan tingkat distribusi pendapatan yang merata atau tidak di daerah tersebut. Selain masih terbatasnya lapangan pekerjaan, pengangguran di Kota Banda Aceh disebabkan juga oleh beberapa faktor seperti skill yang masih kurang dari pencari kerja yang tidak sesuai dengan standar dunia kerja dan masih kurangnya minat pencari kerja untuk berwirausaha secara mandiri, juga arus urbanisasi dari daerah Kabupaten lain ke Kota Banda Aceh untuk mencari pekerjaan.

Perkembangan TPAK setiap tahunnya semakin meningkat baik Kota Banda Aceh maupun Provinsi Aceh dan Nasional, TPAK Kota Banda Aceh selama beberapa tahun terakhir selalu lebih rendah dari Provinsi Aceh dan Nasional, grafik perkembangan TPAK Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 5  
Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh,  
Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2012 – 2015



*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional 2013-2016*

Dari segi relevansi maka kecenderungan kenaikan TPAK di Kota Banda Aceh relevan dengan kecenderungan kenaikan TPAK di level Aceh tapi tidak relevan dengan nasional karena TPAK Nasional pada tahun terakhir kecenderungan menurun.

## 2.2. Bidang Kesehatan

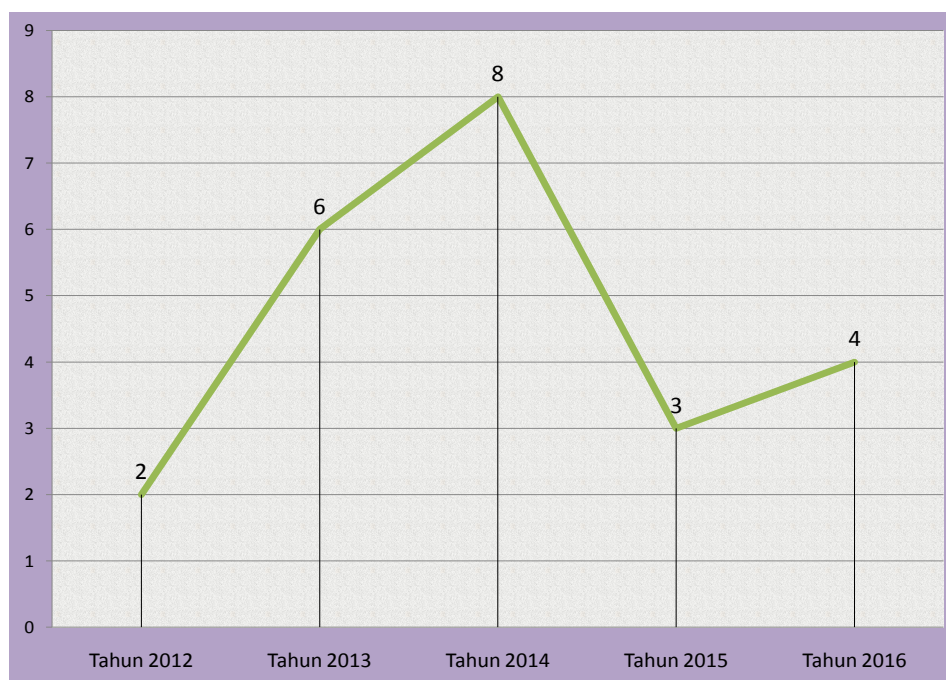
Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs diantaranya diharapkan dapat mengakhiri segala bentuk kemiskinan disemua negara manapun, mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang didunia pada semua usia.

1. Perkembangan antar waktu dan antar wilayah

a.) Angka Kematian Bayi (AKB)

Jumlah kematian bayi di Kota Banda Aceh Tahun 2016 berjumlah 24 kematian dari 5.468 kelahiran hidup, setelah dikonversikan Angka Kematian Bayi menjadi 4 per 1000 kelahiran hidup terjadi kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2015 sebesar 3 per 1000 kelahiran hidup dan terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 sebesar 8 per 1000 kelahiran hidup, Tahun 2013 sebesar 6 per 1000 kelahiran hidup sedangkan Tahun 2012 sebesar 2 per 1000 kelahiran hidup, untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. 6  
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banda Aceh  
Tahun 2012 - 2016

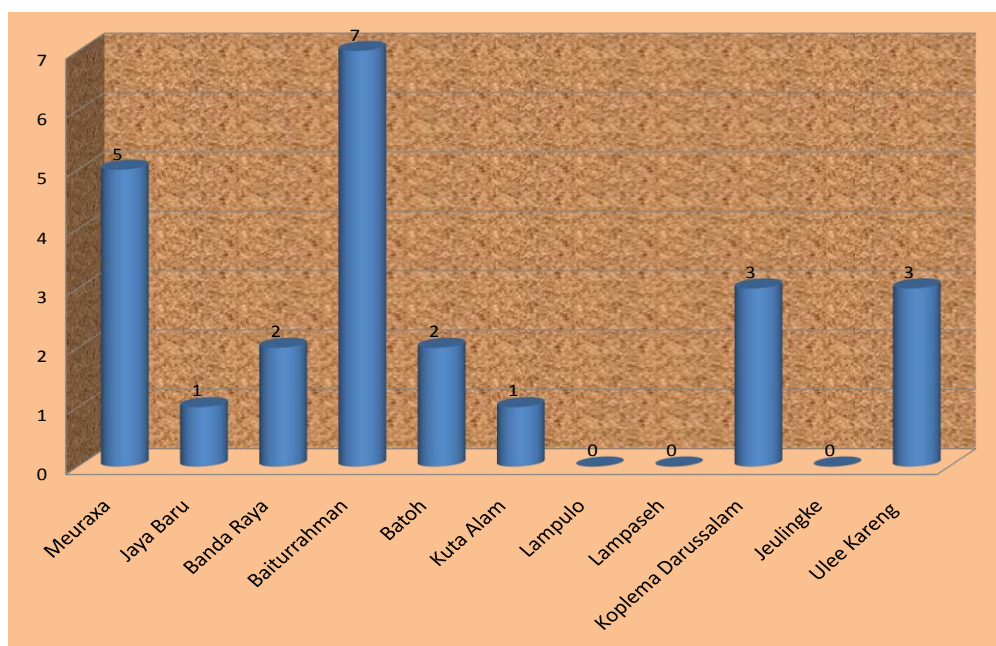


*Sumber: Dinkes Kota Banda Aceh Tahun 2016*

Jumlah kematian bayi di Kota Banda Aceh Tahun 2016 sebesar 24 kematian, dimana kematian bayi tertinggi di UPTD Puskesmas Baiturrahman sebesar 7 kematian, dan terdapat 3 UPTD Puskesmas yang melaporkan tidak ada kematian bayi pada Tahun 2016 yaitu UPTD

Puskesmas Lampulo, Lampaseh dan Jeulingke, data AKB di 11 Puskesmas Kota Banda Aceh dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 7  
Jumlah Kematian Bayi Menurut UPTD Puskesmas Dalam Wilayah  
Kota Banda Aceh Tahun 2016

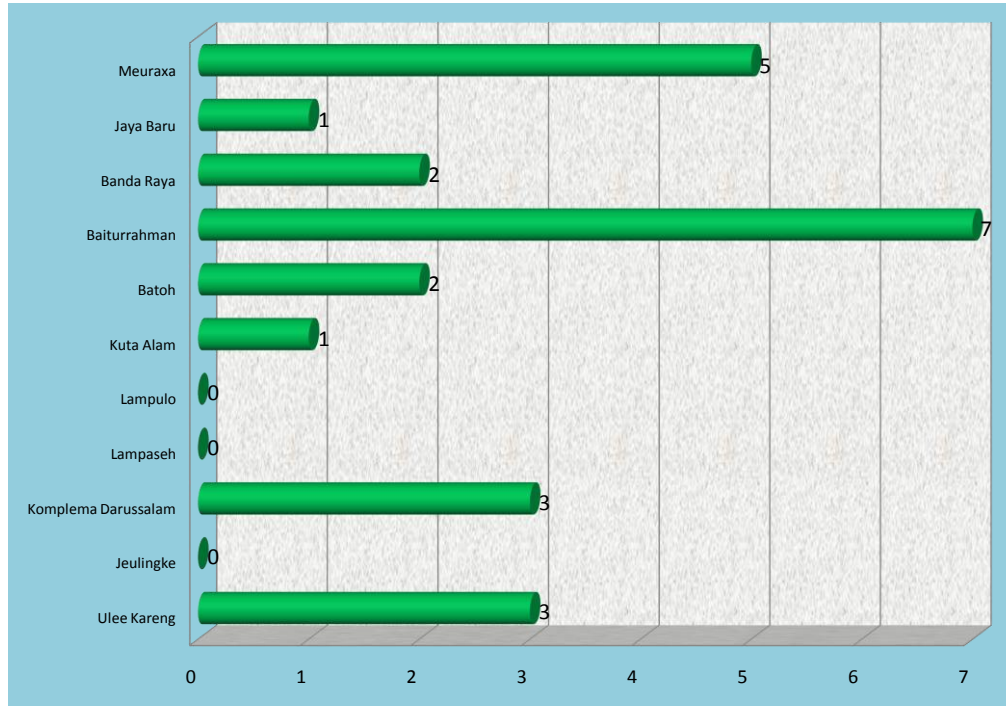


*Sumber : Dinkes Kota Banda Aceh 2016*

b.) Angka Kematian Balita (AKBa)

Kematian Balita (AKBa) adalah jumlah kematian yang terjadi pada anak umur 1 sampai 5 tahun. Angka kematian Balita di Kota Banda Aceh Tahun 2016 sejumlah 4 balita. Jumlah kematian Balita di Kota Banda Aceh 24 orang, yang tertinggi terjadi di UPTD Puskesmas Baiturrahman dan terendah di UPTD Puskesmas Lampulo, Lampaseh dan Jeulingke dimana tidak ada kematian, untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 8  
Jumlah Kematian Balita Menurut UPTD Puskesmas Dalam Wilayah  
Kota Banda Aceh Tahun 2016



*Sumber : Dinkes Kota Banda Aceh Tahun 2016*

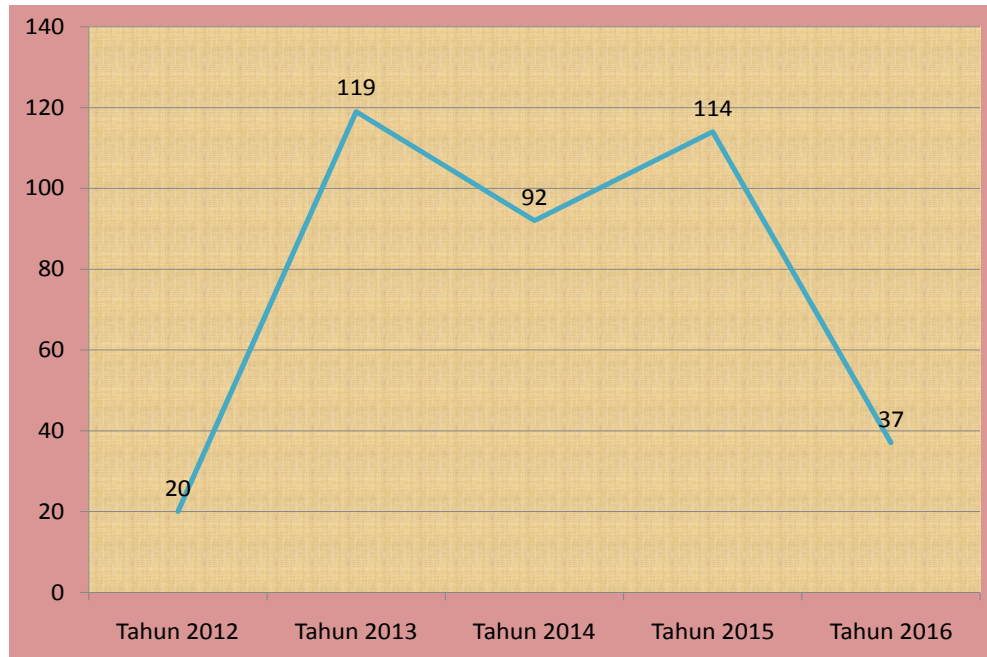
c.) Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Kematian Ibu Tahun 2012 sebanyak 1 orang sedangkan pada Tahun 2013 meningkat sebesar 6 kematian, Tahun 2014 sebesar 5 kematian, Tahun 2015 sebesar 6 kematian dan Tahun 2016 kembali menurun sebesar 2 kematian dan dari kedua kematian ibu tersebut adalah kematian ibu nifas.

Angka kematian ibu di Kota Banda Aceh pada tahun 2016 adalah 37 per 100.000 kelahiran hidup terjadi penurunan dibandingkan dengan Tahun 2015 sebesar 114 per 100.000 kelahiran hidup, Tahun 2014 sebesar 92 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2013 sebesar 119 per 100.000 kelahiran hidup dan Tahun 2012 sebesar 20 per 100.000 kelahiran hidup (grafik 2.9).



Grafik 2. 9  
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Banda Aceh  
Tahun 2012 – 2016



*Sumber : Dinkes Kota Banda Aceh Tahun 2016*

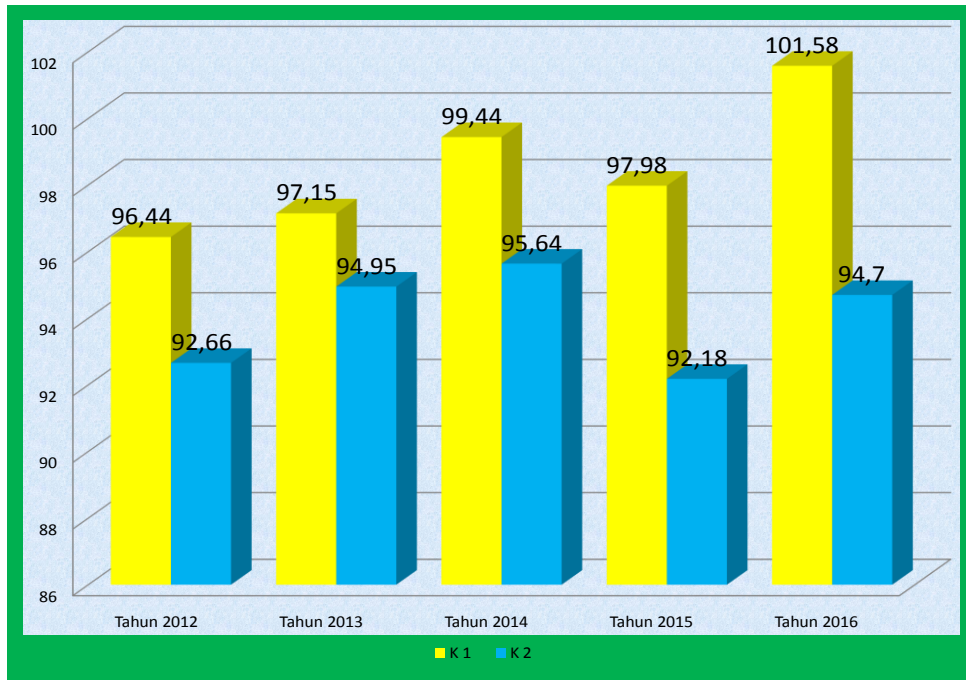
## 2. Pelayanan Kesehatan.

### a.) Pelayanan Ibu Hamil K-1 dan K-4

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya. Hasil pelayanan antenatal dapat dilihat dari cakupan K1 dan K4.

Salah satu indikator dalam standar pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kota Banda Aceh adalah K4. Hasil pemantauan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dari Tahun 2012 – 2016 dimana K4 ibu hamil cenderung meningkat, pada tahun 2012 mencapai angka 92,66 persen dan meningkat mencapai 94,70 persen pada Tahun 2016. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat perlindungan terhadap ibu hamil dan kelangsungan program KIA di Kota Banda Aceh sudah meningkat dan berada pada taraf yang diharapkan (grafik 2.10).

Grafik 2. 10  
Cakupan K1 Dan K4 Ibu Hamil di Kota Banda Aceh  
Tahun 2012 – 2016



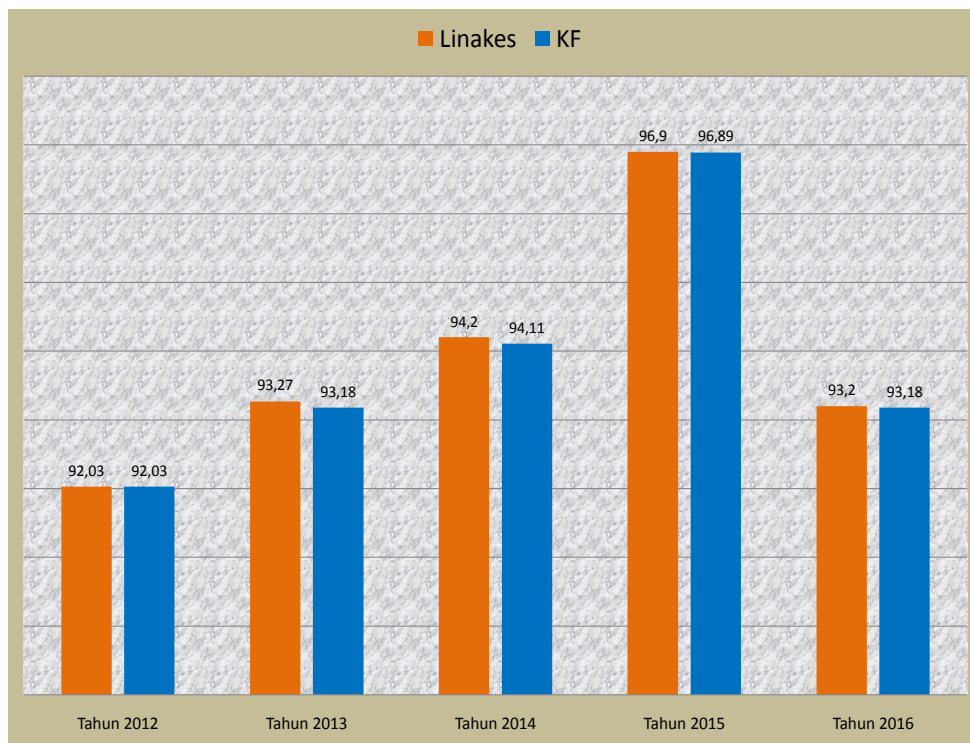
*Sumber Dinkes Kota Banda Aceh Tahun 2016*

b.) Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Kunjungan Nifas

Cakupan persalinan di Kota Banda Aceh dari tahun 2012 – 2016 menunjukkan bahwa persentase pertolongan persalinan tenaga kesehatan mengalami peningkatan yaitu dari 92,03 persen pada tahun 2012 menjadi 93,20 persen pada tahun 2016.

Pelayanan nifas di Kota Banda Aceh Tahun 2016 sebesar 93,18 persen sedangkan pertolongan persalinan oleh petugas kesehatan yaitu sebesar 93,20 persen. Perbandingan antara pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kunjungan ibu nifas dari Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 11  
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Dan Kunjungan  
Nifas di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016



*Sumber Dinkes Kota Banda Aceh Tahun 2016*

### 2.3. Bidang Pendidikan

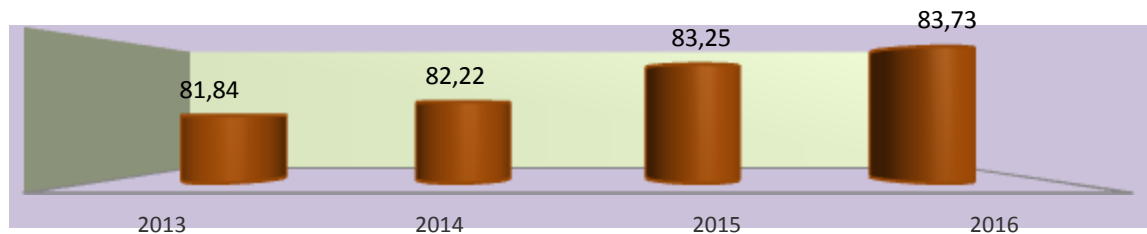
#### a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai *leading* sektor pendidikan melalui kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya melakukan peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Kota Banda Aceh.

Tingkat pendidikan di Kota Banda Aceh telah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tingginya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun yang merupakan komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita. Bahkan IPM Kota Banda Aceh terus meningkat melebihi tingkat Nasional menjadi 83,73 pada tahun 2016 yang jauh melampaui IPM Provinsi Aceh Tahun 2016: 70,00)

dan Nasional Tahun 2016 : 69,55. Berikut ini adalah IPM Kota Banda Aceh 2013-2016.

Grafik 2. 12  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh 2013-2016\*



*\*Angka Sementara, IPM dengan metode perhitungan terbaru*

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh 2017*

#### b. Fasilitas Pendidikan

Dari sisi fasilitas, sarana pendidikan di Kota Banda Aceh telah cukup memadai, yakni terdapat sebanyak 145 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 84 Sekolah Dasar, 32 Sekolah Menengah Pertama, 29 Sekolah Menengah Atas dan 8 Sekolah Menengah Kejuruan pada Tahun 2016.

Tabel 2. 2  
Fasilitas Kota Banda Aceh

| Uraian  | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------|------|------|------|
| SEKOLAH |      |      |      |
| TK      | 87   | 92   | 85   |
| SD/MI   | 83   | 97   | 84   |
| SMP/MTs | 31   | 40   | 32   |
| SMA/MA  | 30   | 46   | 29   |
| SMK     | 8    | 8    | 8    |

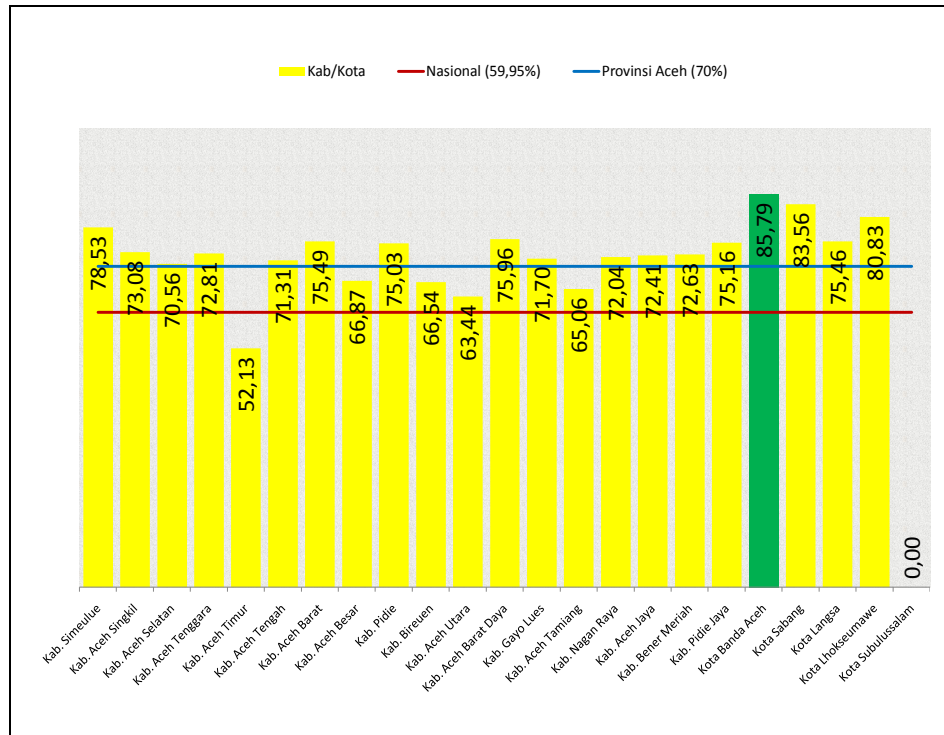
| MURID   |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|
| TK      | 7 540  | 7361   | 7 645  |
| SD/MI   | 21 301 | 22 017 | 22 827 |
| SMP/MTs | 9 582  | 13 320 | 9 356  |
| SMA/MA  | 8 722  | 11 560 | 9 236  |
| SMK     | 2 875  | 3 134  | 3 425  |
| GURU    |        |        |        |
| TK      | 740    | 860    | 758    |
| SD/MI   | 1 253  | 1 753  | 1 225  |
| SMP/MTs | 889    | 1 181  | 887    |
| SMA/MA  | 1 034  | 1 688  | 967    |
| SMK     | 413    | 421    | 446    |

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya. Pada tahun 2016 Posisi relatif APM SMA/MA Kota Banda Aceh sebesar 85,79 persen berada di bawah rata-rata APM Nasional (96,94 persen) dan Provinsi Aceh (99,83 persen) seperti yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Grafik 2. 13

Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten  
di Provinsi Aceh 2016

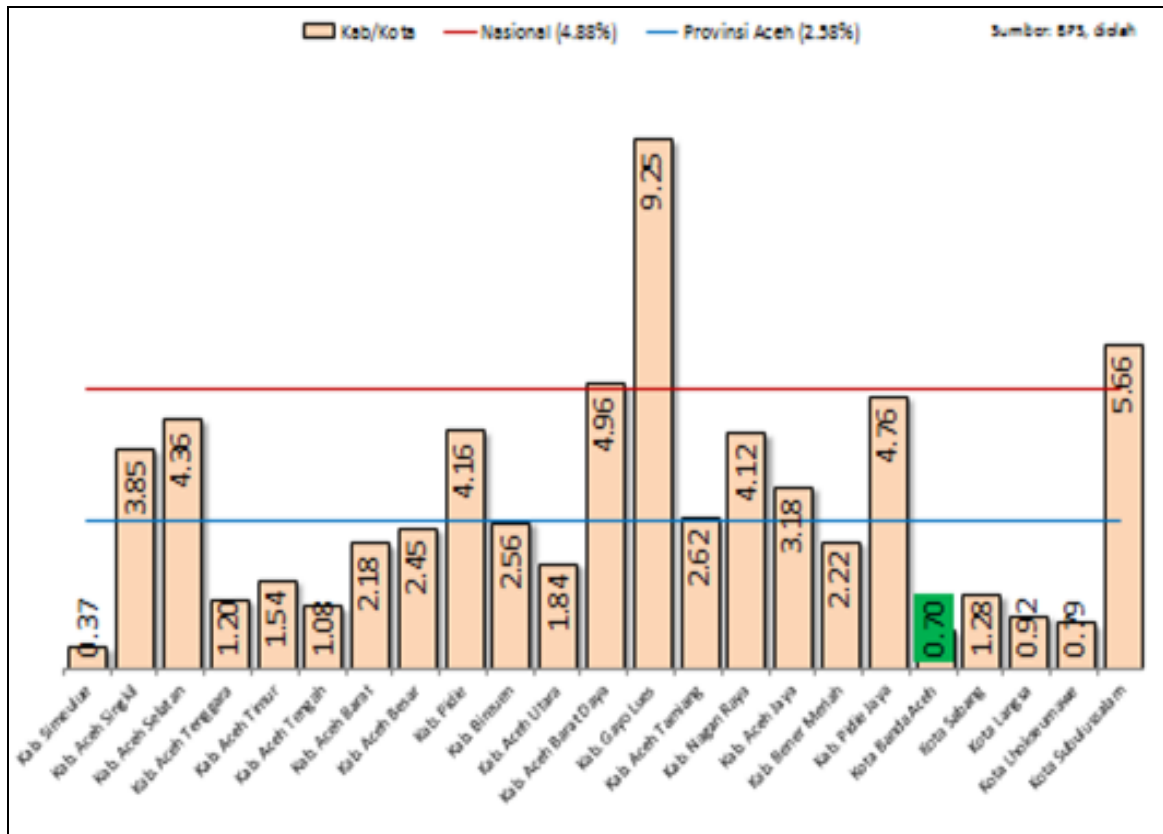


Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

#### d. Buta Huruf

Persentase penurunan jumlah penduduk buta huruf di kota Banda Aceh terus mengalami penurunan yang sangat menggembirakan. Posisi relatif angka buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Banda Aceh sebesar 0,70 persen berada di bawah rata-rata angka buta huruf Nasional (4,88 persen) dan Provinsi Aceh (2,58 persen) yang dapat dilihat pada grafik berikut

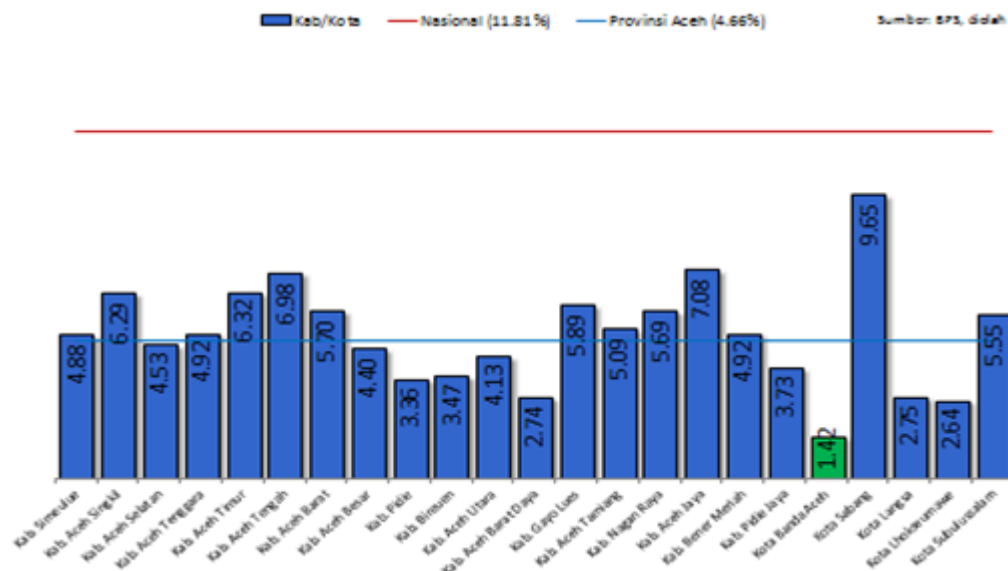
Grafik 2. 14  
Posisi Relatif Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) Kabupaten  
di Provinsi Aceh 2016



#### e. Jarak Jangkauan Sekolah

Jarak jangkauan ke sekolah di Kota Banda Aceh, sudah cukup baik dan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas proses belajar anak didik di sekolah. Dalam hal kemudahan jangkauan sekolah atau akses ke sekolah di Kota Banda Aceh pada tahun 2016 merupakan yang terbaik di Provinsi Aceh, yang dapat dilihat dari posisi relative jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA di Kota Banda Aceh sejauh 1,42 km berada di bawah rata-rata jarak sekolah Nasional (11,81 km) dan Provinsi Aceh (4,66 km), sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2. 15  
Posisi Relatif Jarak Sekolah Menengah atas SMA/MA (km) Kabupaten  
di Provinsi Aceh



#### f. Pelaksanaan Pendidikan Diniyah

Sebagai daerah yang memiliki kekhususan terkait penerapan Syariat Islam, Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan kebijakan Pendidikan Diniyah yang merupakan program untuk meningkatkan pengetahuan agama bagi generasi muda guna memperkuat akidah sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Secara umum seluruh jenjang pendidikan di Kota Banda Aceh telah melaksanakan kurikulum yang berbasis Islam melalui kompetensi inti, yang terdiri dari aspek sikap spiritual (aspek ketuhanan) dan aspek sikap sosial.

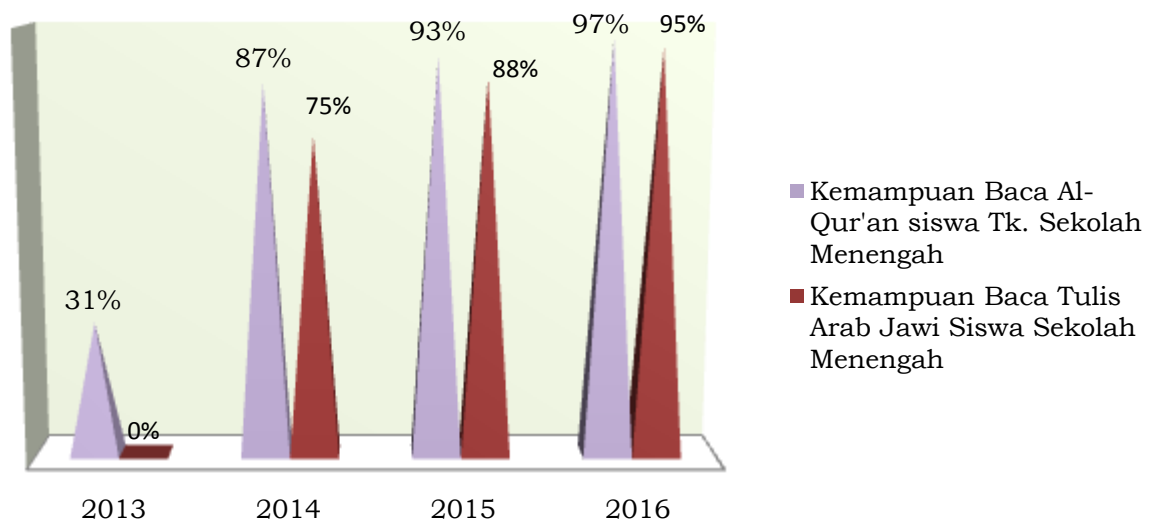
Pemerintah Kota Banda Aceh melalui penerapan program diniyah pada sekolah menengah menargetkan peningkatan kemampuan baca Al-Qur'an bagi 97 persen jumlah siswa sekolah menengah dan realisasi pada Tahun 2016 yang mencapai 100 persen. Dari total siswa sekolah menengah sebanyak 12.445 siswa, sebanyak 12.070 siswa mampu baca Al-Qur'an secara benar dan baik.



Pencapaian target ini didukung melalui adanya persyaratan masuk sekolah menengah di Kota Banda Aceh yang harus melampirkan sertifikat diniyah bagi siswa dari lingkup sekolah Kota Banda Aceh dan adanya tes baca Alquran bagi siswa dari luar lingkup sekolah Kota Banda Aceh.

Pendidikan diniyah mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam baik formal, nonformal maupun informal. Para siswa diajarkan berbagai materi agama Islam meliputi ilmu ketauhidan, Al-Qur'an, budi pekerti, dan pemahaman hukum-hukum Islam (fiqih) serta kemampuan untuk baca tulis Arab Jawi. Sepanjang pelaksanaan program diniyah sampai tahun 2016, tercatat dari total siswa sekolah menengah sebanyak 12.445 siswa, yang mampu baca tulis Arab Jawi secara baik sebanyak 11.822 siswa, atau terealisasi 95 persen dari target yang ditetapkan (grafik di bawah ini)

Grafik 2. 16  
Capaian Indikator melalui Kegiatan Pendidikan Diniyah Kota Banda Aceh  
Tahun 2013-2016



#### 2.4. Bidang Prasarana Dasar

Tabel 2. 3  
Indikator Dimensi Prasarana Dasar di Kota Banda Aceh (persen), 2016

| No. | INDIKATOR                                           | Capaian Daerah (2016) |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak        | 83,39%                |
| 2   | Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak         | 91,72%                |
| 3   | Proporsi Rumah Tangga dengan Ases Listrik           | 100%                  |
| 4   | Proporsi Desa dengan Akses Jalan R4 Sepanjang Tahun | 100%                  |
| 5   | Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik               | 100%                  |

##### 2.4.1. Akses Air Minum Layak

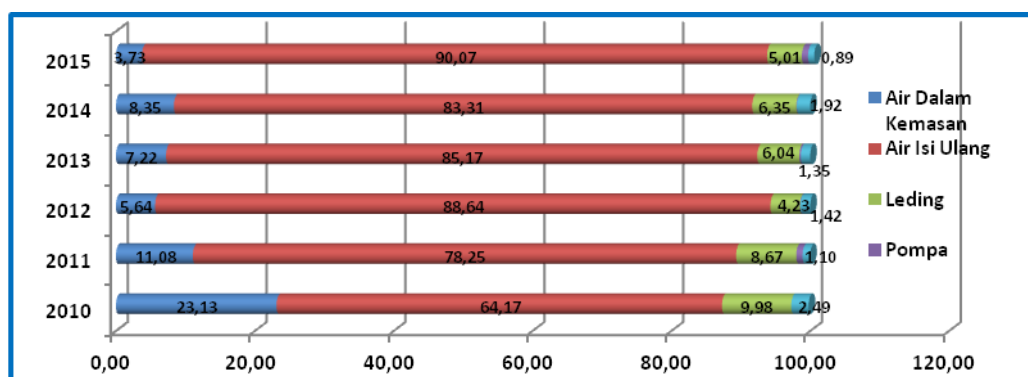
Dalam pelayanan air minum di Kota Banda Aceh saat ini belum tercapainya pelayanan secara maksimal baik terhadap cakupan pelayanan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Hal ini disebabkan oleh terus terjadinya penambahan jumlah penduduk dan pembangunan perumahan dan industri yang terus berkembang di Kota Banda Aceh. Pemasangan jalur perpipaan terus ditingkatkan untuk dapat mengejar cakupan pelayanan dan peningkatan kapasitas pelayanan air minum 100 persen diwilayah administrasi Kota Banda Aceh yang telah mencapai 83,39 persen saat ini.

Upaya-upaya yang terus dilakukan untuk peningkatan cakupan pelayanan yaitu menargetkan cakupan pelayanan di tahun 2018 adalah 93 persen untuk pencapaian target 100 persen pelayanan ditahun 2019 nantinya. Untuk pencapaian 4 K (Kualitas, Kwantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan) dalam Sistem Penyediaan Air Minum, PDAM Tirta Daroy Banda Aceh melakukan program pembentukan zona pelayanan menjadi 4 wilayah. Hal ini diharapkan nantinya dapat melakukan manajemen pendistribusian air minum dengan metode pendistribusian berdasarkan

kebutuhan (*management supply and demand*). Dengan terbentuknya zona di wilayah pelayanan air minum diharapkan dapat menurunkan angka tingkat kehilangan air yang masih diatas 40 persen dan manajemen tekanan air di sistem perpipaan yang selama ini masih bermasalah serta dapat dibentuknya Distrik Meter Area (DMA) sebagai solusi pelayanan terhadap kualitas pelayanan dan penurunan tingkat kehilangan air oleh PDAM Tirta Daroy saat ini.

Permasalahan yang masih menjadi kendala dalam sistem penyediaan air minum di Kota Banda Aceh adalah sumber air baku yang sampai saat ini hanya menggunakan air dari Krueng Aceh, dimana kebutuhan terus meningkat dan kualitas air baku yang makin lama makin buruk terutama saat musim penghujan akibat rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai Krueng Aceh yang menjadi sumber utama air baku untuk pengolahan air minum untuk Kota Banda Aceh. Hal ini lebih lanjut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 17  
Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum di Kota Banda Aceh (persen),  
2010-2015



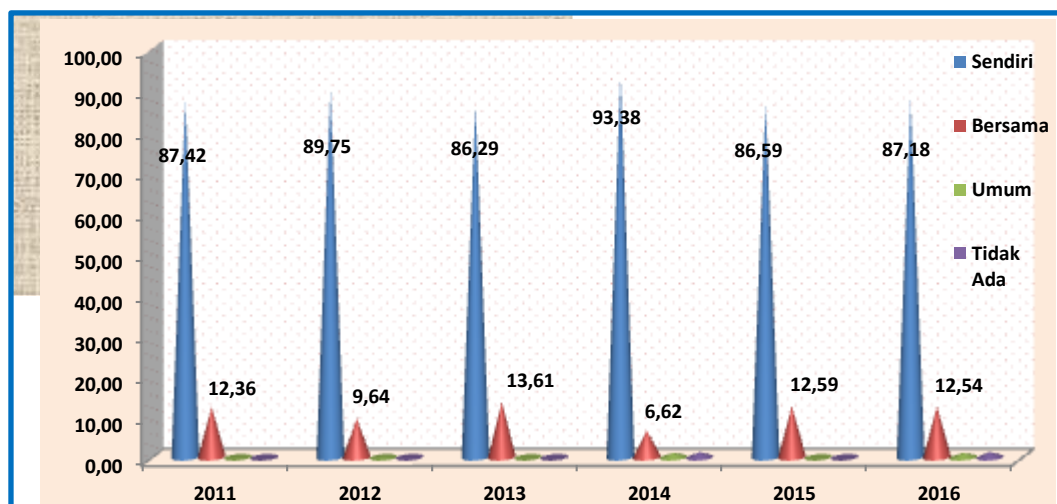
Sumber : Statistik Banda Aceh 2010-2015

#### 2.4.2. Akses Sanitasi Layak

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna peningkatan daya saing daerah didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2015 akses terhadap sanitasi layak yang dimiliki penduduk Kota Banda Aceh sudah melebihi 95 persen walaupun

masih terdapat 1,36 persen penduduk yang belum menggunakan fasilitas tempat buang air besar yang benar. Fasilitas tempat buang air besar yang dimiliki secara bersama-sama tampaknya menjadi salah satu pilihan yang harus diambil sebagian warga di kala belum mampu memiliki fasilitas sendiri. Hal ini terlihat dari persentasenya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan sanitasi yang memenuhi persyaratan bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penjelasan secara grafis dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 18  
Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Tempat Buang Air Besar  
di Kota Banda Aceh (persen), 2011-2016

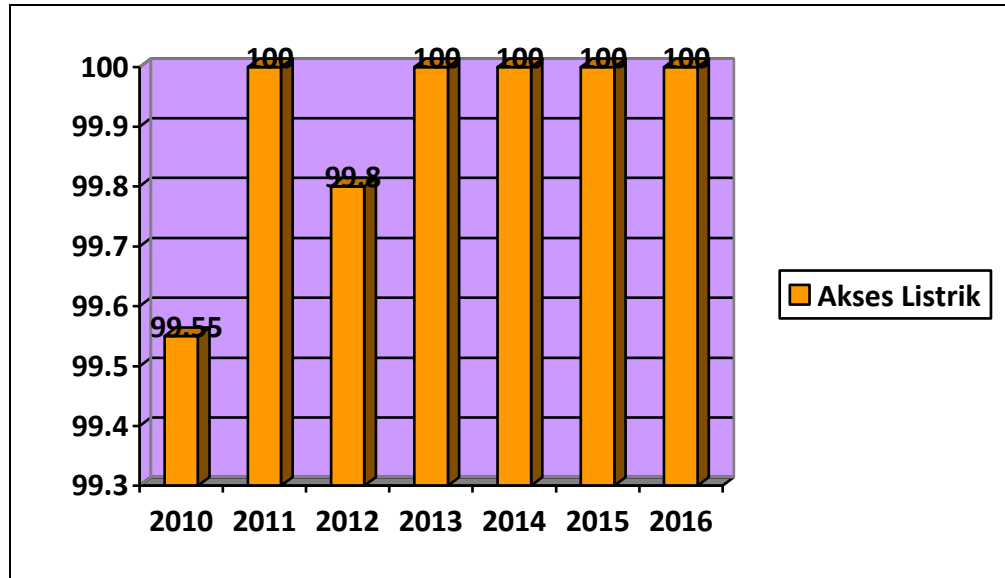


*Sumber : Statistik Banda Aceh, 2011-2016*

#### 2.4.2. Akses Listrik

Sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 proporsi rumah tangga dengan akses listrik yang berasal dari PT. PLN di Kota Banda Aceh telah mencapai 100 persen. Hal ini dapat di lihat pada grafik di bawah

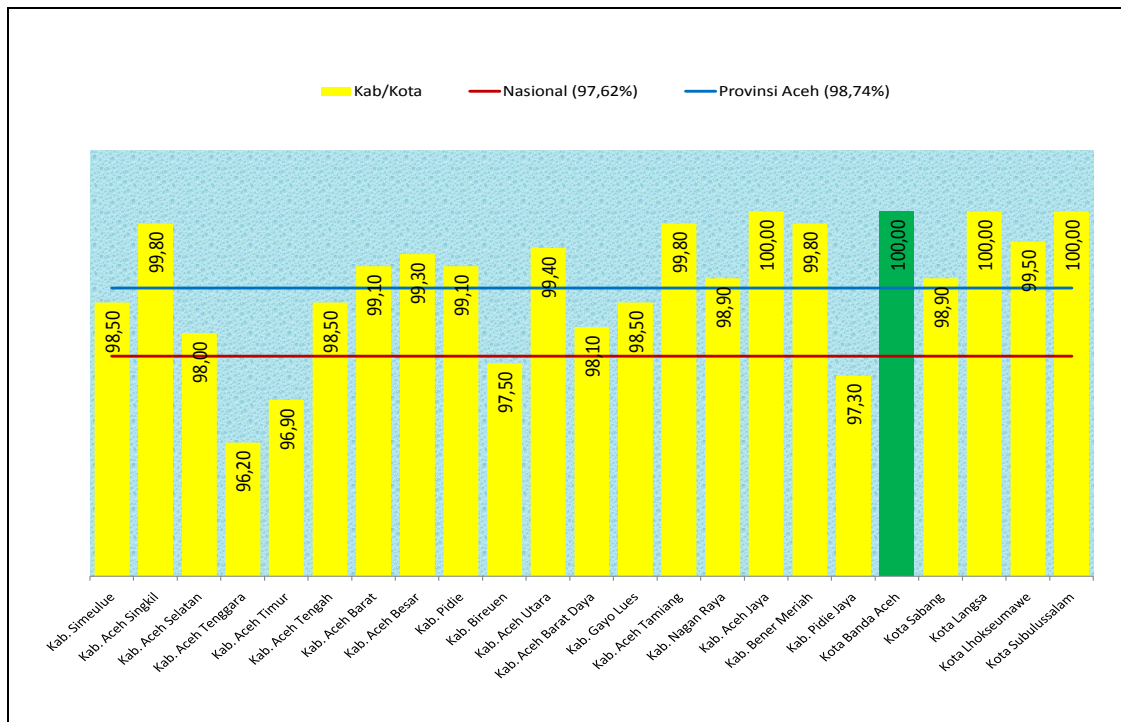
Grafik 2. 19  
Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik  
di Kota Banda Aceh (persen), 2010-2016



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pada tahun 2016 proporsi rumah tangga dengan akses listrik Kota Banda Aceh sebesar 100 persen berada di atas rata-rata Nasional (97,62 persen) dan di atas Propinsi Aceh (98,74 persen) seperti pada grafik 2.20 di bawah ini:

Grafik 2. 20  
Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (Persen)  
Provinsi Aceh Tahun 2016



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

## 2.5. Bidang Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan basis utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi, ketahanan nasional yang berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi utama dari subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi, dimana dalam mencapai ketahanan pangan dapat dilakukan alternatif pilihan apakah swasembada atau kecukupan. Dalam pencapaian swasembada perlu difokuskan pada terwujudnya ketahanan pangan.

Dalam pengembangannya, teknologi pangan diharapkan mampu memfasilitasi program pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, serta dapat secara efektif mendukung kebijakan strategi ketahanan pangan.

Kondisi harga Internasional menimbulkan berbagai masalah terhadap ketersediaan dan distribusi, harga komoditas pangan, terutama pangan strategis seperti beras dan daging sapi.

Ketersediaan pangan adalah sejumlah bahan pangan (makanan) yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara/daerah dalam suatu kurun waktu tertentu baik dalam bentuk natural maupun bentuk gizinya. Ketersediaan pangan dihitung dari produksi dalam negeri ditambah cadangan pangan dan import dikurangi ekspor. Berikut ini adalah capaian indikator Bidang Ketahanan Pangan Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016:

Tabel 2. 3  
Capaian Indikator Ketahanan Pangan Kota Banda Aceh  
Tahun 2012-2016

| NO | Indikator                          | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|----|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Perkembangan harga beras           | 8.078  | 8.584  | 8.867  | 10.500 | 10.421 |
| 2. | Perkembangan harga gula pasir      | 12.801 | 12.873 | 11.235 | 13.000 | 14.511 |
| 3. | Perkembangan harga minyak goreng   | 11.256 | 10.340 | 11.098 | 10.000 | 14.511 |
| 4. | Perkembangan harga telur ayam      | 1.024  | 10.340 | 1.252  | 1.300  | 1.384  |
| 5. | Perkembangan harga daging ayam ras | 21.101 | 26.103 | 26.832 | 22.500 |        |

*Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh*

Kota Banda Aceh merupakan ibu Kota Provinsi Aceh dengan luas wilayah yang sangat terbatas, sehingga lahan untuk pertanian sudah tidak tersedia. Semua kebutuhan pangan untuk Kota Banda Aceh dipasok dari daerah lain.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, bahwa harga rata-rata kebutuhan pokok di Kota Banda Aceh terus mengalami kenaikan harga terutama saat puasa dan menjelang hari Raya Idul Fitri. Naiknya harga beras dan bahan kebutuhan pokok ini sangat dipengaruhi oleh laju inflasi di Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan terjadi permintaan barang yang sangat tinggi juga terjadi gagal panen dari daerah-daerah sentra produksi pertanian karena

faktor bencana alam seperti banjir sehingga berpengaruh terhadap kelancaran distribusi dan pasokan barang pada pasar-pasar di Kota Banda Aceh. Peningkatan harga beras dan bahan pokok ini bisa mempersulit situasi penduduk miskin karena semakin banyak pengeluaran yang dikeluarkan untuk konsumsi sehingga mereka makin sulit keluar dari kemiskinan.

## **2.6. Survey dan Analisa Data Kemiskinan Tahun 2017**

Program penanggulangan kemiskinan, haruslah diletakkan pada kerangka dasar yang lebih berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat yang nyata. Untuk menciptakan strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif, diperlukan analisis profil kemiskinan dan tingkat pengangguran yang lebih baik. Analisis lebih dalam memungkinkan karena tersedianya data kemiskinan yang lebih detail dari database kemiskinan yang dikembangkan oleh Unit Pelaksana Tehnis Badan Geographic Information System (UPTB GIS) Bappeda Kota Banda Aceh, yang bernama SPPKS (Sistem Pemantauan Program Kesejahteraan Sosial). Sistem ini mengkombinasikan data-data kemiskinan dari berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang selama ini berjalan tidak terintegrasi. Data-data dari database kemiskinan ini dapat dijadikan dasar untuk analisis karakteristik kemiskinan dan pengangguran yang lebih dalam di Kota Banda Aceh. Hasil dari analisis ini dapat dijadikan input untuk menciptakan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Jumlah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan dari 10%-40% terendah yang ada di Kota Banda Aceh berasal dari data BDT 2015 yang nantinya akan disinkronkan dengan data TNP2K tahun 2011 dan verifikasi Bappeda tahun 2013. Data tersebut akan disandingkan dengan data TNP2K 2015 yang saat ini sedang dilakukan oleh UPTB GIS Bappeda Kota Banda Aceh. Berikut data Agregat BDT jumlah Rumah tangga kondisi kesejahteraan dari 10%-40% dalam wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Per Kecamatan dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 2. 4  
Data Agregat BDT RTS  
dengan Kondisi Tingkat Kesejahteraan dari 10%-40% Terendah  
Kota Banda Aceh Tahun 2015 Per Kecamatan

| Kecamatan    | Jumlah Rumah Tangga |              |              |              |              |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              | Desil 1             | Desil 2      | Desil 3      | Desil 4      | Total        |
| MEURAXA      | 85                  | 284          | 210          | 251          | 830          |
| JAYA BARU    | 86                  | 302          | 192          | 218          | 798          |
| BANDA RAYA   | 116                 | 304          | 208          | 174          | 802          |
| BAITURRAHMAN | 186                 | 369          | 268          | 247          | 1,070        |
| LUENG BATA   | 138                 | 262          | 168          | 173          | 741          |
| KUTA ALAM    | 127                 | 390          | 282          | 286          | 1,085        |
| KUTA RAJA    | 122                 | 248          | 221          | 200          | 791          |
| SYIAH KUALA  | 139                 | 454          | 272          | 248          | 1,113        |
| ULEE KARENG  | 218                 | 475          | 266          | 230          | 1,189        |
| <b>TOTAL</b> | <b>1,217</b>        | <b>3,088</b> | <b>2,087</b> | <b>2,027</b> | <b>8,419</b> |

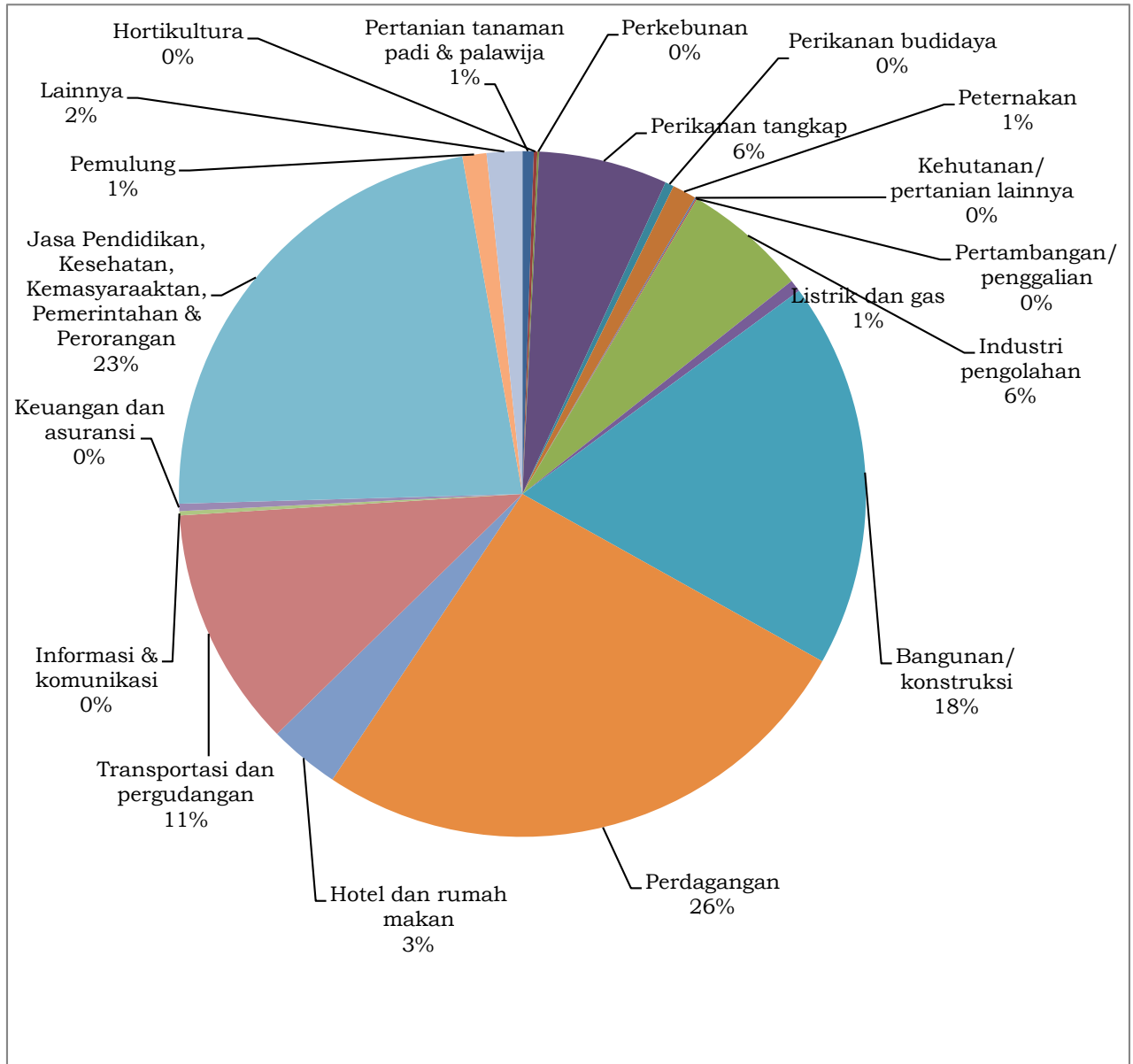
*Sumber : Basis data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (2015)*

Catatan :

- Desil 1 (Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan sampai 10% terendah di Indonesia)
- Desil 2 (Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan sampai 11% - 20% terendah di Indonesia)
- Desil 3 (Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan sampai 21% - 30% terendah di Indonesia)
- Desil 4 (Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan sampai 31% - 40% terendah di Indonesia)

Dari analisis berdasarkan database kesejahteraan dari 10%-40% berdasarkan Agregat BDT Tahun 2015, didapatkan berbagai fakta menarik, bahwa jumlah rumah tangga dengan kesejahteraan dan rentan miskin tertinggi dalam Kota Banda Aceh terdapat dalam kecamatan Ulee Kareng yaitu 1,189 rumah tangga sasaran sedangkan pada Kecamatan Luengbata hanya 741 rumah tangga sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di kecamatan Lueng Bata sudah banyak yang bekerja. Berikut data Agregat BDT 2015 berdasarkan pekerjaan dan pendidikan, dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. 21  
Jumlah rumah tangga menurut lapangan pekerjaan dengan Kondisi Tingkat Kesejahteraan dari 10%-40% Terendah di Kota Banda Aceh Tahun 2015



Sumber: Hasil Analisis TNP2K 2015

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa lapangan pekerjaan yang sangat dominan di Kota Banda Aceh didominasi oleh sektor perdagangan yang mencapai 26 persen. Kemudian diikuti pada bidang Jasa Pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, pemerintahan dan perorangan sebesar 23 persen dan transportasi dan perdagangan 11 persen.

Pengangguran bukanlah penyebab utama kemiskinan di Kota Banda Aceh. Penyebab kemiskinan utama adalah rendahnya gaji/pendapatan yang didapatkan penduduk miskin dari pekerjaan di tiga sektor tersebut. Fakta ini bisa dijadikan salah satu *main input* bagi strategi penanggulangan kemiskinan Kota Banda Aceh.

Tabel 2. 5  
Penduduk Berdasarkan Pendidikan  
dengan Kondisi Tingkat Kesejahteraan dari 10%-40% Terendah di Kota  
Banda Aceh Tahun 2015

| <b>Umur</b> | <b>Bersekolah<br/>(orang)</b> | <b>Tidak bersekolah<br/>(orang)</b> | <b>Jumlah<br/>Bersekolah dan<br/>Tidak<br/>Bersekolah</b> |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 7-12        | 5.042                         | 97                                  | 5.139                                                     |
| 13-15       | 1.945                         | 88                                  | 2.033                                                     |
| 16-18       | 1.160                         | 557                                 | 1.717                                                     |
| Total       | 8.147                         | 742                                 | 8.889                                                     |

*Sumber: Data BDT tahun 2015*

Tingkat pendidikan penduduk dengan kesejahteraan terendah 10-40 persen di atas dapat dijadikan dasar untuk memetakan hubungan antara sektor yang banyak menyerap penduduk rentan miskin dan tingkat pendidikannya.

Berdasarkan data BDT (Basis Data Terpadu) Tahun 2015 dari database kemiskinan TNP2K Tahun 2015 menjelaskan bahwa kemiskinan sangat erat hubungannya dengan tingkat pendidikan. Dari tabel diatas menjelaskan bahwa dari 8.889 orang wajib sekolah dan tidak bersekolah usia (7-18 tahun) ternyata anak yang bersekolah dalam kota Banda Aceh untuk tingkat umur 7-12 Tahun menduduki peringkat tertinggi sebesar 57 persen (5.042 orang).

Pada tahun 2016 TKPK melalui UPTB GIS Kota Banda Aceh mengembangkan aplikasi SPPKS sehingga dapat diakses langsung oleh

masyarakat gampong, pengembangan aplikasi ini bernama DKMG (Database Kemiskinan Masyarakat Gampong).

Dalam tahun 2017 akan dilakukan Sosialisasi Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Sosialisasi Aplikasi Database Kemiskinan Masyarakat Gampong (DKMG) kepada seluruh keuchik dalam wilayah Kota Banda Aceh. Aplikasi ini dibangun supaya gampong bisa mengupdate data perubahan penduduk miskin setiap tahun serta menghindari komplain dari para keuchik setiap ada penyaluran bantuan untuk fakir miskin. Data-data penduduk miskin per gampong tersebut akan diinput oleh masing-masing operator gampong. Saat ini data verifikasi dan validasi Bappeda tahun 2013 sudah tidak update dan data TNP2K tahun 2015 banyak tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga para keuchik merasa keberatan untuk menggunakan data tersebut karena akan diprotes oleh masyarakat.

Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) adalah satu-satunya mekanisme untuk melakukan pemutakhiran Data TNP2K tahun 2015 yang diakui oleh Pusat dengan melibatkan BPS.

**BAB III**  
**RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN**  
**KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017**

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui pengembangan SDM
3. Pemberdayaan UMKM dengan Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil
4. Mendirikan Lembaga Keuangan yang mengucurkan kredit lunak pada rakyat miskin (Baitul Qiradh)
5. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
6. Mensinergikan kegiatan anggaran program sektor dan daerah yang diarahkan langsung kepada kelompok masyarakat miskin
7. Meningkatkan kapasitas pemerintah Kecamatan dan Gampong/Desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) dan forum publik lainnya
8. Mengembangkan forum publik untuk monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Dalam rangka percepatan penanggulangan permasalahan kemiskinan, pemerintah Kota Banda Aceh melakukan beberapa kebijakan, di antaranya:

1. Meningkatkan kualitas dan akurasi database angka kemiskinan dengan menggunakan 14 (empat belas) indikator, yang merupakan gabungan antara indikator nasional dan indikator lokal dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif berskala mikro/informal terutama dikalangan keluarga miskin
3. Meningkatkan kualitas kebijakan dan program serta kegiatan yang *pro poor* dan *pro job*.

4. Mengkoordinasi perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
5. Melakukan sinergi kebijakan dan program secara bersama dengan semua unsur masyarakat.
6. Melakukan evaluasi dan monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Kota Banda Aceh mengikuti klasifikasi program penanggulangan kemiskinan nasional yang diklasifikasikan dalam beberapa klaster program sebagai berikut:

1. Klaster 1 adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah individu atau keluarga. Program penanggulangan kemiskinan klaster 1 ini disebut juga sebagai program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga (*Family Centered Integrated Social Assistance*). Bantuan sosial berbasis keluarga mencakup:
  - a. Bantuan langsung kepada keluarga sasaran. Bantuan langsung dapat berupa bantuan langsung tunai bersyarat (*Program Keluarga Harapan (PKH) –Conditional Cash Transfer*), Bantuan langsung tunai tanpa syarat (*Unconditional Cash Transfer*), Bantuan langsung dalam bentuk *inkind* (Beras miskin/Raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya.
  - b. Bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini.
  - c. Bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua berkaitan dengan kesehatan dan gizi (*parenting education*) melalui pemberian pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
2. Klaster 2 adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah masyarakat atau komunitas. Program penanggulangan kemiskinan klaster 2 ini juga disebut sebagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari program klaster 2 adalah untuk meningkatkan keberdayaan kelompok-kelompok masyarakat agar dapat memaksimalkan fungsinya dalam masyarakat

yang pada gilirannya berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

3. Klaster 3 adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah usaha mikro dan kecil. Program penanggulangan kemiskinan klaster 3 ini juga disebut sebagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.
4. Klaster 4 adalah program dan kegiatan dalam klaster ini berbasis pada upaya peningkatan dan perluasan program pro rakyat. Kelompok program ini adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap ketersediaan pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Program-program dalam kelompok ini adalah program kemiskinan lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Tabel 3. 1  
Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2017

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                     | SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2017 (Rp) |                      |      |                       | SKPD                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|-----------------------|----------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | APBK                                 | APBK/ZIS             | APBA | APBN                  |                                  |
|    | <b>KLASTER I</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                      |      |                       |                                  |
| 1  | <b>Beasiswa Miskin</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1,170,000,000</b>                 |                      |      |                       | Disdikbud koordinasi dengan BPKK |
|    | Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Tingkat SD                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                      |      |                       |                                  |
|    | Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Tingkat SMP                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                      |      |                       |                                  |
|    | <b>Bantuan BOS :</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                      |      | <b>27,466,600,000</b> | Disdikbud                        |
|    | BOS Pusat untuk SD                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                      |      | 18,261,600,000        |                                  |
|    | BOS Pusat untuk SMP                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                      |      | 9,205,000,000         |                                  |
| 2. | <b>Dana Penunjang Pendidikan (DPP) atau BOSDA:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>3,693,112,200</b>                 |                      |      |                       |                                  |
|    | DPP untuk SD (BOSDA)                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,898,912,200                        |                      |      |                       |                                  |
|    | DPP untuk SMP (BOSDA)                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,794,200,000                        |                      |      |                       |                                  |
| 3. | <b>Beasiswa Miskin</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | <b>2.325.100.000</b> |      |                       | Baitul Mal                       |
|    | - MUQ : 17 org x 12 bln x Rp.900.000,- dengan perincian : 1. Santri MUQ Angk IV ( 4 org x 6 bln x Rp.900.000 = Rp.21.600.000), 2. Santri MUQ Angk V ( 3 org x12 bln x Rp.900.000 = Rp.32.400.000) dan 3.Santri MUQ Angk VI ( 10 org x 6 bln x Rp.900.000 = 54.000.000) |                                      | 108,000,000          |      |                       |                                  |



| NO | PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                     | SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2017 (Rp) |                      |      |                       | SKPD        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|-----------------------|-------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                        | APBK                                 | APBK/ZIS             | APBA | APBN                  |             |
|    | - Setengah penuh : 195 org x 12 bln x Rp. 300.000,- dengan perincian : 1. setengah penuh tahap IV ( 95 org x 6 bln x Rp.300.000 = 171.000.000), 2. setengah penuh tahap V (100 org x 6 bln x Rp.300.000 = 180.000.000) |                                      | 351,000,000          |      |                       |             |
|    | a. SD : 1.000 org x Rp. 400.000,-                                                                                                                                                                                      |                                      | 400,000,000          |      |                       |             |
|    | b. SMP : 1.000 org x Rp. 500.000,-                                                                                                                                                                                     |                                      | 500,000,000          |      |                       |             |
|    | c. Santri Pesantren Salafi : 50 org x 12 bln x Rp 500,000,-                                                                                                                                                            |                                      | 300,000,000          |      |                       |             |
|    | d. Tahfiz Al-Qur'an (luar negeri ) Malaysia dan Thailand: 30 org x 12 bln x Rp 500,000,-                                                                                                                               |                                      | 866,100,000          |      |                       |             |
| 4  | Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)                                                                                                                                                                                      |                                      | 4,160,000,000        |      |                       |             |
| 5  | Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)                                                                                                                                                                                         |                                      |                      |      | 787,372,000           | Dinkes      |
| 6  | Penyaluran Rastra                                                                                                                                                                                                      |                                      |                      |      | 1,951,488,000         | Bag.Ekonomi |
| 7  | <b>Bantuan Sosial</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1.340.000.000</b>                 |                      |      |                       | BPKK        |
|    | Disabilitas/Direncanakan                                                                                                                                                                                               | 480,000,000                          |                      |      |                       | BPKK        |
|    | Bantuan yang Tidak Direncanakan                                                                                                                                                                                        | 860,000,000                          |                      |      |                       | BPKK        |
| 8  | Program Keluarga Harapan (PKH)                                                                                                                                                                                         |                                      |                      |      | <b>4,770,280,000</b>  | Dinsos      |
|    | <b>Jumlah</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>6.203.112.200</b>                 | <b>6.685.100.000</b> |      | <b>34.975.740.000</b> |             |
|    | <b>Total Klaster 1</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>47.863.952.200</b>                |                      |      |                       |             |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN | SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2017 (Rp) |          |      |             | SKPD |
|----|------------------------------------|--------------------------------------|----------|------|-------------|------|
|    |                                    | APBK                                 | APBK/ZIS | APBA | APBN        |      |
|    | <b>KLASTER II</b>                  |                                      |          |      |             |      |
| 1  | Dana Desa                          |                                      |          |      | 637,466,714 | DPMG |
|    | <b>Total Klaster 11</b>            | <b>637.466.714</b>                   |          |      |             |      |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN                                                         | SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2017 (Rp) |             |      |      | SKPD              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------|------|-------------------|
|    |                                                                                            | APBK                                 | APBK/ZIS    | APBA | APBN |                   |
|    | <b>KLASTER III</b>                                                                         |                                      |             |      |      |                   |
| 1  | Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM)                                               | 3,000,000,000                        |             |      |      | DPMG              |
| 2  | Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya               | 1,771,586,173                        |             |      |      | Disnaker          |
| 3  | Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industry           | 196,054,660                          |             |      |      | Disnaker          |
| 4  | Pelatihan Tenaga Pendampingan Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan                          | 24,773,000                           |             |      |      | P3AP2KB           |
| 5  | Bimbingan Manajemen Usaha dan Teknis Reproduksi bagi Perempuan Pelaku Usaha                | 11,330,000                           |             |      |      | P3AP2KB           |
| 6  | Bantuan Modal Usaha kecil                                                                  |                                      | 261,000,000 |      |      | Baitul Mal        |
| 7  | Pelatihan ketrampilan                                                                      |                                      | 100,800,000 |      |      | Baitul Mal        |
| 8  | <b>Program Pengembangan dan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM</b>                | <b>4,474,227,900</b>                 |             |      |      | Diskop, UKM & Dag |
|    | Pelatihan kewirausahaan                                                                    | 34,029,700                           |             |      |      | Diskop, UKM & Dag |
|    | Bantuan Modal berupa barang kepada UKM                                                     | 4,378,000,000                        |             |      |      | Diskop, UKM & Dag |
|    | Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD                                               | 62,198,200                           |             |      |      | Diskop, UKM & Dag |
| 9  | <b>Program peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian</b>                                      | <b>172.419.000</b>                   |             |      |      | DP2KP             |
|    | Pengadaan benih bayam, cabe, selada, sawi, tomat, terong, bunga kol dan bibit bawang merah | 36,144,000                           |             |      |      | DP2KP             |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN                                                                                                 | SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2017 (Rp) |          |      |      | SKPD |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                    | APBK                                 | APBK/ZIS | APBA | APBN |      |
|    | Pengadaan polybag                                                                                                                  | 15,300,000                           |          |      |      |      |
|    | Pengadaan pupuk NPK                                                                                                                | 4,725,000                            |          |      |      |      |
|    | Pupuk Kandang                                                                                                                      | 6,250,000                            |          |      |      |      |
|    | Bantuan Tanaman Buah Dalam Pot (Tabulapot)                                                                                         | 50,000,000                           |          |      |      |      |
|    | Pengadaan Alat dan Bahan Pertanian untuk Kelompok Tani                                                                             | 60,000,000                           |          |      |      |      |
| 10 | <b>Program Pengembangan Budidaya perikanan</b>                                                                                     | <b>1,904,950,000</b>                 |          |      |      |      |
|    | Pengadaan Bibit Ikan Lele Untuk Kelompok                                                                                           | 12,000,000                           |          |      |      |      |
|    | Pengadaan Pakan Ikan Lele Untuk Kelompok                                                                                           | 5,950,000                            |          |      |      |      |
|    | Pengadaan Kapal Boat dan Boat Kayu Kelompok Nelayan                                                                                | 375,000,000                          |          |      |      |      |
|    | Benih/bibit Lele, lele dumbo dan Pakan Untuk Kelompok                                                                              | 275,000,000                          |          |      |      |      |
|    | Pembuatan Keramba, Jaring Nelayan dan rumpon laut Untuk Kelompok                                                                   | 210,000,000                          |          |      |      |      |
|    | Bantuan Budidaya Kepiting, Peralatan Perangkap kepiting, Untuk Kelompok                                                            | 30,000,000                           |          |      |      |      |
|    | Benih Nila dan Pakan Untuk Kelompok                                                                                                | 335,000,000                          |          |      |      |      |
|    | Bantuan peralatan muge eungkot, Fiber ikan, Cool box, Cool box fiber 200 liter                                                     | 197,000,000                          |          |      |      |      |
|    | Pengadaan sarana Penangkapan Ikan, sarana peralatan utk pengembangan perlengkapan nelayan, alat tangkap jaring, alat pencari tiram | 377,000,000                          |          |      |      |      |
|    |                                                                                                                                    |                                      |          |      |      |      |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN                              | SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2017 (Rp) |                    |      |      | SKPD |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|------|------|
|    |                                                                 | APBK                                 | APBK/ZIS           | APBA | APBN |      |
|    | Bantuan Bibit Ikan Bandeng, pakan dan racun                     | 65,000,000                           |                    |      |      |      |
|    | Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan                            | 23,000,000                           |                    |      |      |      |
| 11 | <b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>            | <b>2,076,388,888</b>                 |                    |      |      |      |
|    | Pengadaan sapi, sapi jantan untuk kelompok                      | 870,000,000                          |                    |      |      |      |
|    | Bantuan Ternak Kambing PE                                       | 225,000,000                          |                    |      |      |      |
|    | Pengadaan Sapi jantan penggemukan untuk kelompok                | 456,388,888                          |                    |      |      |      |
|    | Pengadaan kambing PE Jantan penggemukan dan kambing penggemukan | 150,000,000                          |                    |      |      |      |
|    | Pengadaan kambing dan kambing kacang lokal untuk kelompok       | 325,000,000                          |                    |      |      |      |
|    | Pengadaan itik petelur, itik                                    |                                      | 50,000,000         |      |      |      |
|    | <i>Jumlah</i>                                                   | <b>13.631.729.621</b>                | <b>361.800.000</b> |      |      |      |
|    | <b>Total Kluster III</b>                                        | <b>13.993.529.621</b>                |                    |      |      |      |

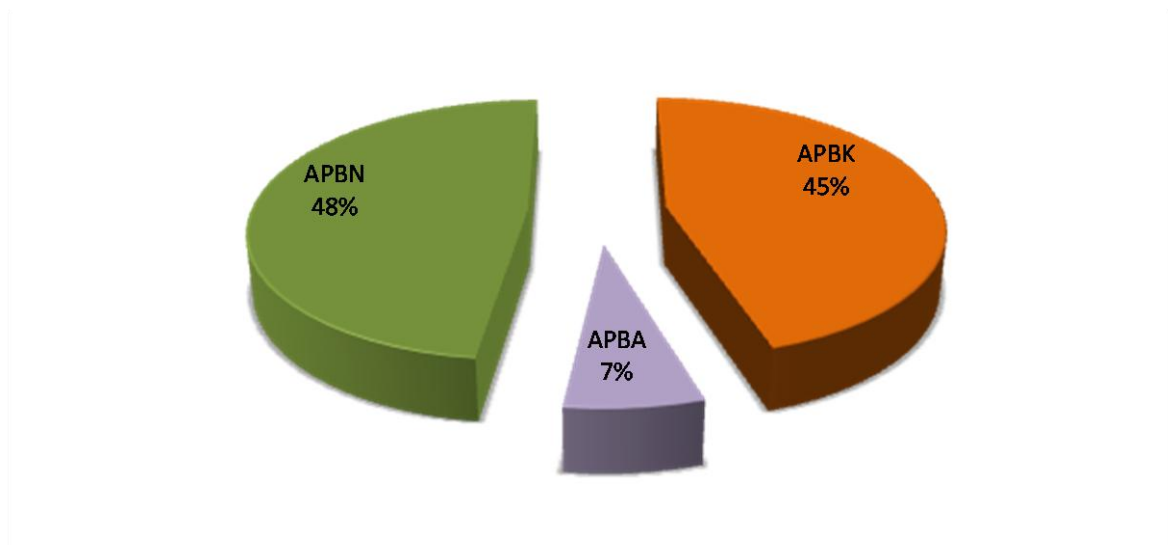
| NO | PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN                                  | SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2017 (Rp) |                      |                      |      | SKPD       |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------|------------|
|    |                                                                     | APBK                                 | APBK/ZIS             | APBA                 | APBN |            |
|    | <b>KLASTER IV</b>                                                   |                                      |                      |                      |      |            |
| 1  | <b>Program Pengembangan Perumahan</b>                               |                                      |                      | <b>5.000.000.000</b> |      | PERKIM     |
|    | Pembangunan sarana dan prasarana rumah sehat sederhana              |                                      |                      | 5.000.000.000        |      |            |
| 2  | <b>Rumah Dhuafa</b>                                                 |                                      | <b>3.225.000.000</b> |                      |      |            |
|    | ↳Pembangunan rumah Dhuafa                                           |                                      | 2,550,000,000        |                      |      | Baitul Mal |
|    | ↳Renovasi Rumah Dhuafa                                              |                                      | 675,000,000          |                      |      | Baitul Mal |
| 3  | <b>Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya</b>              | <b>257.000.000</b>                   |                      |                      |      | Dinsos     |
|    | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin | 111,000,000                          |                      |                      |      | Dinsos     |
|    | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin | 146,000,000                          |                      |                      |      | Dinsos     |
| 4  | <b>Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja</b>     | <b>306,362,500</b>                   |                      |                      |      | Disnaker   |
|    | <b>Jumlah</b>                                                       | <b>3.436.637.500</b>                 | <b>3.225.000.000</b> | <b>5.000.000.000</b> |      |            |
|    | <b>Total Kluster IV</b>                                             | <b>11.661.637.500</b>                |                      |                      |      |            |
|    |                                                                     |                                      |                      |                      |      |            |
|    | <b>Total Kluster I – IV</b>                                         | <b>74.156.586.035</b>                |                      |                      |      |            |

Tabel 3. 2  
Sumber Dana Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan  
Kota Banda Aceh Per Klaster Tahun 2017

| KLAster      | SUMBER DANA (Rp)      |                      |                       |
|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|              | APBK                  | APBA                 | APBN                  |
| Klaster I    | 12.888.212.200        | 0                    | 34.975.740.000        |
| Klaster II   | 0                     | 0                    | 637.466.714           |
| Klaster III  | 13.993.529.621        | 0                    | 0                     |
| Klaster IV   | 6.661.637.500         | 5.000.000.000        | 0                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>33,543,379,321</b> | <b>5.000.000.000</b> | <b>35,613,206,714</b> |

*Sumber : Laporan Bulanan TKPK Kota Banda Aceh Tahun 2017*

Grafik 3. 1  
Persentase Sumber Dana Penanggulangan Kemiskinan  
Kota Banda Aceh Tahun 2017



*Sumber : Laporan Bulanan TKPK Kota Banda Aceh Tahun 2017*

#### **BAB IV**

### **KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Koordinasi antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Provinsi Aceh sangat penting dilakukan, yaitu dengan memahami terhadap latar belakang, tujuan dan sasaran program agar TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat sinergi dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan permasalahan kemiskinan dapat segera ditekan atau dikurangi. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dalam hal penanggulangan kemiskinan di daerah, sehingga program yang dilakukan di daerah sejalan dengan program pusat yang dilaksanakan oleh kementerian terkait.

TKPK Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh diharapkan dapat melakukan rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali pada tahun 2017. Adapun ruang lingkup koordinasi dalam pendekatan kelembagaan adalah sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan (Pasal 6 Permendagri No. 42 Tahun 2010). Bentuk koordinasi dapat melakukan FGD (*Focused Group Discussion*) dan melibatkan unsur masyarakat (swasta; warga miskin yang tidak lagi miskin; representatif dari Rumah Tangga Miskin; tokoh agama dan masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat. Pada tahun ini juga akan dilaksanakan *Sosialisasi MPM dan Aplikasi DKMG* yang melibatkan semua Kepala SKPD, Semua Camat dan semua Keuchik sebanyak 90 gampong di Kota Banda Aceh.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Dokumen Laporan Kinerja TKPK Tahun 2017 ini memuat berbagai capaian dan strategi yang akan dilakukan. Salah satunya dengan memfasilitasi musyawarah Kecamatan dengan para Keuchik dan Instansi terkait.

Secara umum, hasil analisa menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh memiliki profil yang cukup baik jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar. Melalui analisa kondisi kemiskinan Kota Banda Aceh juga ditemukan bahwa penyebab utama kemiskinan di Kota Banda Aceh bukan hanya tingkat pengangguran, namun pendapatan penduduk (*income*) yang rendah dan juga penambahan jumlah penduduk dari luar Kota Banda Aceh yang ingin mencari kerja.

Untuk itu, diperlukan sinergisitas pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, memantapkan hubungan dan keterikatan Provinsi dan Kota, mensinergikan pengelolaan potensi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga intervensi khusus kepada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja miskin, memiliki strategi yang baik agar program yang telah direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, khususnya masyarakat di Kota Banda Aceh.